

MAJALAH FILSAFAT

DRIYARKARA

ISSN 0126-0243.

Thn. XVIII No. 1



PANCASILA

DRIYARKARA

majalah filsafat
sekolah tinggi filsafat
driyarkara jakarta

XVIII
NO. 1
1991/1992

I S I

DARI REDAKSI	2
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	
Alex Lanur	3
JAWANISME DALAM PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP	
A. Setyo Wibowo	9
FILSAFAT PANCASILA DRIYARKARA	
Y. Sudriyanto dan C. Priyanto	30
APA KATA MEREKA TENTANG PANCASILA?	
Tim Redaksi	48

Penerbit	: Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyarkara, Jakarta
Terbit	: 4 (empat) nomor setahun
Pemimpin Umum	: Julius Widiyanto
Staf Redaksi	: Hendra, Rubianto, Edi, Rudi, Sudriyanto, Puspo, Guido, Wiratmo, John, Dicky, Setyo
Administrasi	: Puspo, Rudi, John
Kuangan	: Fery Santosa
Distribusi	: Sudri, Desti, Dicky
Ilustrator	: Rubianto
Harga eceran	: Rp. 1.500,-
Langganan	: Rp. 5.000,- setahun, termasuk ongkos kirim
Alamat Redaksi	: Majalah Filsafat DRIYARKARA Sekolah Tinggi Filsafat DRIYARKARA Jl. Percetakan Negara, Kotak Pos 1397, Jakarta 10013 Tel. 4209377, 417129

Dari Redaksi

PANCASILA, ANTARA KONSEP DAN KENYATAAN

Rangkaian kegiatan penataran P4 beberapa bulan lalu memicu berbagai pembicaraan sekitar Pancasila di STF Driyarkara. Bentangan refleksi dan pencarian unsur-unsur baru diawali dengan kerja kelompok, seminar dan pengolahan pribadi dan menyentuh juga kontekstualisasinya dalam masyarakat. Edisi ini mencoba mengungkapkannya dari sudut filsafat dan sosial untuk memperlengkapi refleksi kita.

Pancasila sebagai ideologi mendapat perhatian khusus. Terutama mengenai pentingnya ideologi bagi suatu negara, usaha menjadikannya sebagai asas tunggal dan pentingnya sikap kritis bahwa masalah ideologi akan senantiasa hadir dalam arus perubahan pembangunan yang sedemikian cepat tentu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tentu mempengaruhi kehidupan ideologi nasional itu sendiri. Adanya kecurigaan sehat bahwa akar budaya Jawa tumbuh subur dalam ideologi ini coba ditelusuri lewat lahirnya Pancasila dan proses pembentukannya lewat analisa budaya.

Nampaknya perlu diperkenalkan juga bagaimana pemikiran seorang filosof Indonesia sendiri. Atas dasar apa dan bagaimana N. Driyarkara memandang dan mengupas Pancasila diharapkan bisa mempertajam refleksi kita.

Akhirnya, supaya mampu berfilsafat lewat konteks, maka kami meninggalkan konsep dan mencoba berpaling pada realitas sosiologis. Lewat wawancara kami mencoba menggali bagaimana orang kecil memandang dan menghayati Pancasila, terutama sebagai falsafah hidup? Juga bagaimana mahasiswa memandang usaha pemasyarakatan Pancasila dan penghayatan dalam hidup sehari-hari. Berdasarkan data sosiologis ini dan sedikit ulasan singkat tim penyunting menawarkan buah refleksinya agar nilai-nilai Pancasila yang memang diakui dan dijunjung tinggi bisa semakin sungguh-sungguh mewarnai tindakan nyata sehari-hari.

PANCASILA

SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Alex Lanur

Pencantuman Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945 menampakkan fungsi pertamanya sebagai dasar negara. Dasar tersebut melandasi bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, antara negara Republik Indonesia dan Pancasila terdapatlah hubungan batin yang sangat erat. Karena itu dapat dikatakan keinginan serta usaha untuk memantapkan kehidupan negara Republik Indonesia tidak berbeda dengan keinginan serta usaha untuk memantapkan Pancasila sebagai dasar negara. Demikianpun sebaliknya.

Pancasila lalu menjadi landasan serta pedoman kehidupan negara bangsa Indonesia dalam menghadapi masa sekarang dan masa depannya. Dengan kata lain, Pancasila sudah menjadi prinsip, asas kehidupan negara bangsa Indonesia. Dalam proses untuk mempertahankan dan memperkembangkan kehidupan negara Indonesia Pancasila sebagai prinsip, asas negara telah disamakan saja dengan Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi nasional.

1. Ideologi

Ideologi semula berarti *science of ideas*. Pengertian serta pengartian ini berkembang karena pengaruh Karl Marx. Ia mengartikan ideologi sebagai suatu pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Dengan demikian ideologi diartikan sebagai bangunan atas, yang didirikan di atas basis ekonomis yang menentukan coraknya; dan karena itu ideologi mencerminkan pola ekonomis tertentu yang oleh karenanya kadar kebenarannya relatif, dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu.

Selain itu masih ada pendapat yang lain juga. Pendapat ini menyatakan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem idea yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.

Bagaimanapun juga dalam perkembangannya hingga sekarang ini ideologi paling tidak memuat tiga pengertian dan pengertian berikut. Pertama, sebagai *Weltanschauung* atau *science of ideas* yaitu pengetahuan yang mengandung cita-cita besar dan pemikiran-pemikiran, mengenai sejarah, masyarakat dan negara. Kedua, sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan. Ketiga, sebagai suatu *belief system* atau sistem nilai dan karenanya berbeda dengan ilmu, filsafat maupun teologi yang secara formal merupakan *knowledge system* atau sistem ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan manusia, bangsa dan negara, ideologi diartikan sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang kehidupan manusia baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara.

2. Ideologi Nasional

Erat berkaitan dengan ini adalah pengertian ideologi nasional. Ideologi nasional adalah cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan di segala bidang demi pencapaian kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi nasional secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman untuk mencapai cita-cita, dasar-dasar guna peningkatan usaha untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan, yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

a. Pentingnya ideologi nasional

Dari yang dikatakan ini paling tidak secara tersirat juga disinggung apa yang menjadi fungsi sebuah ideologi. Ideologi merupakan pemberi arah serta tujuan bagi harapan, pemikiran dan kegiatan bersama dari semua unsur yang ada dalam masyarakat suatu negara. Karena itu, sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan yang bersifat nasional negara sulit dikemudikan secara efisien dan terarah jika tidak ada gambaran yang jelas tentang hakekat, dasar, tujuan serta susunannya.

Gambaran tentang hakekat, dasar, tujuan serta susunan suatu negara kiranya dipadatkan serta dikristalisasikan dalam ideologi nasional. Itulah sebabnya mengapa ideologi nasional memegang dan memainkan peranan penting dalam kehidupan bernegara dan atau bermasyarakat. Artinya, dengan

bantuan ideologi nasional kehidupan bangsa akan terarah dan tidak terombang-ambing. Bangsa yang bersangkutan dapat menjadi kokoh karena tujuan yang dikejarinya juga jelas.

b. Pemantapan ideologi nasional

Dalam rentang sejarahnya bangsa Indonesia berusaha untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai ideologi nasional. Usaha pemantapan itu dapat dibagi ke dalam lima tahap.

Pada tahap pertama (29 Mei 1945 s.d. 17 Juli 1945) dapat disebut sebagai tahap pembahasan dan perumusan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional). Tahap kedua (18 Agustus 1945 s.d. 26 Desember 1949) ditandai dengan hak bangsa Indonesia untuk menyusun satu pemerintahan yang berdaulat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berkat proklamasi kemerdekaannya. Pembukaan UUD 1945 diterima dan disahkan. Dalam Pembukaan itu tercantum rumusan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara (nasional). Juga nampak jelas kaitan erat antara Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu. Artinya, mengubah Pembukaan UUD Proklamasi dan atau Pancasila yang tercantum di dalamnya samalah artinya dengan membubarkan negara Proklamasi, negara Pancasila, negara Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945. Namun dalam kurun waktu ini juga kentara munculnya persaingan ideologi dari berbagai golongan di samping ideologi Pancasila.

Dalam tahap ketiga (27 Desember 1949 s.d. 16 Agustus 1950) ada perubahan penting dalam hidup ketatanegaraan Indonesia. Pertama, UUD 1945 diganti dengan UUD Negara Serikat. Negara Republik Indonesia berbentuk federasi. Artinya, negara kesatuan seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945 ditinggalkan. Kedua, perumusan sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Mukadimah UUD Negara Serikat berbeda dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun demikian secara ideologis Pancasila tetap diterima sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia Serikat.

Tahap yang keempat (17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959) adalah masa perdebatan terbuka tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional); terjadi pertentangan-pertentangan ideologis yang tajam untuk merebut kedudukan menjadi ideologi negara (nasional). Atas nama pemerintah pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno di depan Sidang

Konstituante menganjurkan supaya kembali kepada UUD 1945. Tetapi anjuran itu ditanggapi dengan sikap pro dan kontra oleh lembaga tersebut. Keadaan ini dapat mengancam kesatuan dan persatuan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi UUD 1945.

Tahap kelima (5 Juli 1959 s.d. sekarang; 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 s.d. sekarang), Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional) hanya menjadi semboyan kosong yang diucapkan dalam pidato-pidato pejabat pemerintah, pimpinan partai dan lain sebagainya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (nasional) mau digantikan secara sistematis dengan bantuan tata cara yang dipaksakan agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Namun ada usaha-usaha pada tahun 1966 untuk menemukan kembali Pancasila yang benar. Kemudian ada tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal itu terlihat dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Dalam Memorandum tersebut ditetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945, Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dan tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum.

Atas dasar itu untuk selanjutnya terlihat pelbagai usaha sistematis dan konstitusional untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Melalui TAP No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, MPR menegaskan hubungan antara Pancasila dan Pembangunan Nasional. Melalui TAP No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, MPR menegaskan bahwa sebagai nilai kebudayaan bangsa Pancasila harus dihayati oleh semua warga negara Indonesia. Melalui TAP No. II/MPR/1983 tentang GBHN ditegaskan dua hal utama mengenai Partai Politik dan Pembangunan Nasional. Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosio-politik yang hanya berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan, Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. Perintah GBHN ini terwujud dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kedua UU itu terdapat ketentuan tentang asas yang menetapkan bahwa semua organisasi kekuatan sosio-politik hanya memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas. Selain

itu semua asas yang mencirikan golongan yang dipakai sebelumnya tidak boleh diberlakukan lagi. Ketentuan ini berlaku juga bagi semua organisasi sosio-kemasyarakatan. Dan, agar kedudukan UUD 1945 tidak boleh diganggu gugat lagi, meskipun dalam paa 37 UUD 1945 dibenarkan melakukan perubahan UUD 1945, ditetapkan UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum. Dalam UU itu dikatakan bahwa apabila terdapat keinginan anggota atau golongan masyarakat bangsa Indonesia untuk mengubah UUD 1945 terlebih dahulu harus menanyakan pendapat rakyat.

3. Masih akan ada problem ideologi

Pemantapan Pancasila sebagai ideologi negara (nasional) belumlah menjamin bahwa di masa mendatang tidak lagi ada problem ideologis. Nampaknya problem tersebut masih akan ada.

Memang benar bahwa dalam Sidang Umum bulan Maret 1983 MPR menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik pada umumnya dan bagi partai-partai politik serta Golongan Karya pada khususnya. Hal ini juga kemudian dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Dengan menyimak dinamika kehidupan bangsa dan negara sejak hal itu terjadi sulitlah mengatakan bahwa problem ideologi tidak akan terjadi pada waktu yang akan datang. Bahkan sejak penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi-organisasi kekuatan sosio-politik dan organisasi kemasyarakatan sulitlah mendiamkan adanya pendapat komponen bangsa yang mendukung dan menentangnya.

Selain itu sulitlah menyangkal meluasnya globalisasi dan bangkitnya pelbagai macam ideologi di dunia ini. Ada liberalisme, kapitalisme, ideologi pembebasan, konflik ideologi antara agama-agama dengan sekularisme dan sebagainya. Konflik ini tidak mungkin tidak mempengaruhi kehidupan ideologi nasional Pancasila pada masa yang akan datang. Keadaan ini bahkan diperkuat oleh keterbukaan Indonesia sebagai bangsa.

Akhirnya, masalah-masalah sosio-ekonomis, perkembangan pembangunan yang demikian cepat kiranya juga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu juga mustahil tidak mempengaruhi kehidupan ideologi nasional itu sendiri.

Catatan akhir

1. Lih. Ensiklopedi Politik, Pembangunan, Pancasila, Jilid 2, Jakarta CLC, 1983, hal. 122
2. Lih. Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia, Bandung: 1983, hal. 9-10
3. Kirdi Dipoyudo, Pancasila Arti dan Pelaksanaannya, Jakarta: CSIS, 1979, hal. 9
4. Ini pendapat Hardi, SH. Sebagaimana tercantum dalam Harsja W. Bachtiar (ed.), Percakapan dengan Sidney Hook: Etika, Ideologi Nasional Marxisme dan Eksistensialisme, Jakarta: Djambatar, 1976, hal. 72
5. T.B. Simatupang, "Ideologi-ideologi Besar di Dunia di Masa Datang dan Kemungkinan Pengaruhnya terhadap Pengamanan Pancasila", dalam majalah Ketahanan Nasional, (diterbitkan oleh LEMHANAS), Th. VIII, No. 25, 1979, hal. 81-82
6. Kirdi Dipoyudo, op. cit., hal. 9
7. Babari, "Memantapkan Pancasila sebagai Ideologi Negara", dalam majalah Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 737--747
8. Misalnya nampak antara lain dalam M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasung-surat, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hal. 220, 222--223

Daftar pustaka

1. Babari, "Memantapkan Pancasila sebagai Ideologi Negara", dalam Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 737--747
2. Djadijono M., "Pembangunan Ideologi selama Orde Baru: Problem dan Prospeknya", dalam Analisa XIV, 9 September 1985, hal. 749--763
3. Ensiklopedi Politik, Pembangunan, Pancasila, Jilid 2, Jakarta: CSIS, 1979
4. Geertz C., "Ideology as a Cultural System", dalam D.E. Apter, Ideology and Discontent, New York: The Free Press, 1964
5. Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Ideologi Pancasila adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia, Bandung, 1983
6. Kirdi Dipoyudo, Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya, Jakarta: CSIS, 1979
7. Segundo, J. L., The Liberation Theology, Dublin: Gill and Macmillan, 1977
8. Thompson, J. B., Studies in the Theory of Ideology, Cambridge: Polity Press, 1984.

JAWANISME DALAM PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP

A. Setyo Wibowo

Pendahuluan

Ketika Sukarno mengemukakan suatu *Weltanschauung* bagi bangsa Indonesia pada hari keempat sidang BPUPKI,¹ lahirlah suatu konsepsi tentang Pancasila. Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa, sampai saat ini, selalu diperkenalkan sebagai "wakil" dari *pandangan hidup bangsa Indonesia*.²

Dalam karangan yang berdasarkan studi bacaan ini, akan diungkapkan dan ditelusuri makna sebutan *pandangan hidup bangsa Indonesia* tersebut. Maka, pertama-tama akan disampaikan konsepsi awal pidato Sukarno. Kemudian, komentar-komentar sekitar pandangan hidup bangsa Indonesia dan beberapa studi perbandingan terhadap kemungkinan adanya lapis budaya *Jawanisme* dalam pandangan hidup tersebut. Akhirnya, juga akan diungkapkan beberapa hal aktual saat ini yang amat sesuai dengan gejala yang dianalisa di atas.

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

a. Konsepsi awal Pancasila dalam Pidato Sukarno

Berangkat dari keprihatinan Sukarno, bahwa rekan-rekan seperjuangannya belum menyatakan apa "dasar negara itu", dan malahan dilihatnya cenderung *zwaarwichtig* akan perkara kecil-kecil maka ia mengemukakan ide-idenya tentang Indonesia merdeka dan apa dasar negaranya dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.³ Pada tanggal tersebut Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, ketua sidang mengajukan pertanyaan: "Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya?" Dengan petunjuk seorang ahli bahasa ia mengajukan Pancasila sebagai konsepsi dasar negara yang akan dibentuk. Sistematika pemikiran inilah yang akan dibahas berikut ini.

Dalam sebuah *stenografisch verslag* pidato Bung Karno, dapat ditelusuri konsep dasar negara yang merupakan penjelasan dari angan-angannya sendiri. Setelah membicarakan tentang hal merdeka, Sukarno mulai masuk ke pembicaraan soal dasar negara.⁴ Tiap pandangan hidup yang hendak dijadikan dasar negara (*philosophische grondslag*) haruslah merupakan sesuatu yang sudah dibulatkan dalam hati dan pemikiran bangsa sendiri,⁵ yaitu sepanjang sejarah dulu hingga kini, dan disetujui bersama-sama. Pembulatan hati dan pemikiran yang sudah dikerjakan sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Kemudian, sebagai perbandingan tentang bagaimana suatu *Weltanschauung* itu muncul, Sukarno mengungkapkan tentang bermacam-macam *Weltanschauung* yang ada di dunia saat ini, seperti *National-sozialistische Weltanschauung* (Hitler, Jerman), *Marxistische Historisch-Materialistische Weltanschauung* (Lenin, Uni-Soviet), *Tenoo Koodoo Seishin* (Nippon, sewaktu pendirian Dai Nippon), Islam (Ibn. Saud, Saudi Arabia), *San Min Chu I* (Sun Yat Sen, Pendirian Tiongkok Merdeka). Ia menyatakan bahwa kita tidak dapat meniru-niru *Weltanschauung* di atas. Ia mengajak untuk mencari suatu persatuan *philosophische grondslag*, mencari *Weltanschauung* baru yang sama-sama disetujui.⁶

Selain aspek historis-komparatif dan aspek politis-psikologis-strategis yang ikut mendukung lahirnya Pancasila, urutan logis di atas akhirnya menggumpal dalam suatu Pancasila yang secara resmi termuat dalam pembukaan UUD'45.⁷

Konsepsi Pancasila tampaknya tidak dimunculkan sebagai suatu konsekuensi logis dari sistem filosofis tertentu, sebagaimana bila disejajarkan dengan pemikiran filosofis Nietzsche tentang manusia, yang kemudian tergumpal dalam pemikiran Hitler dan memunculkan *National - sozialistische Weltanschauung* di Jerman, atau pemikiran filosofis Karl Marx yang berdasarkan pemikiran dan interpretasi Lenin memunculkan *Historisch-Materialistische Weltanschauung* di Uni Soviet. Pancasila sebagai suatu *Weltanschauung* diasalkan dari suatu pepadatan atas segala pandangan hidup yang sudah ada di bumi Indonesia ini.⁸

Maka dalam kaitan ini, bagaimana pun juga dalam segi-segi tertentu kelahiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari obsesi Sukarno akan bangsanya sendiri.⁹ Prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam pidatonya tersebut merupakan apa yang sudah menjadi urat dalam jiwanya selama berpuluh tahun.

b. Beberapa Komentar Seputarnya

Menurut Roeslan Abdulgani¹⁰ Pancasila secara primer adalah dasar negara Indonesia. Primer dalam arti maksud, tujuan, dan fungsinya yang semula. Suatu dasar negara yang mengandung *fundamental foundation of state* yang mencakup rangkaian sistem pemikiran, cita-cita, dan keyakinan bulat yang saling terkait secara logis. Menurutnya, keseluruhan pancaran dari fundamen yang *mengisi perumahan bangsa tersebut* kemudian mewujudkan diri menjadi ideologi negara. Ideologi tersebut didahului oleh atau bersumber pada suatu *filsafat* tertentu. Pengertian filsafat di sini menurut Roeslan Abdulgani adalah:

" suatu keandrungan mencari hikmah kebenaran dan kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan, di mana dengan itu manusia selalu berusaha melalui renungan dan pemikiran memperoleh suatu pandangan menyeluruh tentang hakekat alam semesta tempat ia hidup, yang mana dengan itu manusia akan didorong untuk lebih menegaskan sikap dan pendiriannya mengenai dasar dan tujuan hidup di tengah alam semesta ini."

Bila orang sudah sampai pada suatu pandangan dan pendirian tertentu terhadap hidup ini, maka filsafat-nya sudah mengendap menjadi suatu *Weltanschauung* atau *Lebensanschauung* (pandangan hidup).

Dengan kata lain, dalam bahasa Roeslan, *Weltanschauung* merupakan endapan dari suatu filsafat yang sudah ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Pengertian filsafat itu sebenarnya lebih tepat didefinisikan sebagai falsafah.¹¹ Jadi, *Weltanschauung* Pancasila memang merupakan sistematisasi dan perumusan dari pandangan-pandangan hidup yang ada di antara bangsa Indonesia sendiri.

Jadi, dari asal usulnya Pancasila tidak berasal dan tidak mengasalkan diri dari suatu pemikiran filosofis tertentu.¹² Ia adalah falsafah atau pandangan hidup hasil pematangan dari pandangan-pandangan hidup yang dinyatakan berasal dari bangsa Indonesia. Pada mulanya intinya adalah bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup. Proses selanjutnya ia berkembang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Akhirnya, ada yang men-filsafatkan-nya. Akibatnya, kemudian muncul istilah filsafat Pancasila sebagai hasil dari pem-filsafatan pokok-pokok pemikiran Pancasila oleh beberapa orang tertentu.

2. Pandangan Hidup di dalam Pancasila

a. Pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri

Berkaitan dengan asal-usulnya, Pancasila pada intinya adalah pandangan hidup. Sukarno berkali-kali menegaskan bahwa ia bukanlah pencipta, melainkan penggali Pancasila dari khasanah sejarah bangsa Indonesia jauh sebelum agama-agama besar mulai menyebar luas di bumi kita ini. Pancasila sebagai pandangan hidup baik sebagai satu kesatuan maupun lima silanya satu persatu berakar dalam hidup sosio-budaya asli bangsa Indonesia bahkan jauh sebelum masa Hindu dan Islam, yaitu masa pra-Hindu.

Sudah sejak awal dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menjelaskan bahwa pandangan hidup yang ia kemukakan itu merupakan sesuatu yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri.¹³ Selanjutnya, dalam pidato tanggal 17 Agustus 1954 ia memperjelas hal tersebut dengan mengatakan bahwa:

" Apa yang saja kerdjakan tempo hari, ialah sekedar memformuleer perasaan-perasaan jang ada di dalam kalangan rakjat dengan beberapa kata-kata, jang saja namakan Pantja Sila saja sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian Aku menggali di dalam buminja rakjat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu hidup lima perasaan.... Kebiasaan-kebiasaan suku-suku bangsa Nusantara jang ditjerminkan dalam adat lembaga, adalah milik bangsa Indonesia sedjak djaman kuno sekali.... Di dalam masjarakat adat hak-hak mempunjai milik dibatasi sendiri oleh semangat saling tolong-menolong, berkorban dan suka mendjamu. Disana tampeklah suatu semangat keadilan sosial jang mendasari susunan pembagian tanah jang setjara demokratis diaturkan oleh permusjawaratan. Kehidupan suka damai ... "

Lima berlian Pancasila yang terdapat dalam warisan bangsa sejak jaman pra-Hindu ini,¹⁴ kemudian diasah dalam masa Pergerakan Nasional sampai akhirnya mencapai bentuk definitif. Pandangan-pandangan yang termuat di situ adalah gagasan mengenai hubungan vertikal dengan Tuhan, gagasan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kolektivisme, dan gotong-royong.¹⁵

Maka tampak jelas dari uraian-uraian di atas, bahwa nilai dasar pandangan hidup dalam Pancasila diasalkan sebagai dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain, pada

hakekatnya Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah *inherent*, ada secara intrinsik dalam diri masyarakat Indonesia, atau Pancasila adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar dalam hidup bangsa Indonesia.¹⁶ Nilai-nilai dalam pandangan hidup ini adalah corak dan karakter bangsa Indonesia sehingga layak disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

Maka jelaslah bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup berasal dari khasanah budaya asli Indonesia sendiri, seperti dikatakan secara eksplisit oleh Sukarno berasal dari jaman pra-Hindu. Masalah yang cukup rumit di sini adalah bangsa Indonesia itu yang mana? siapa? dan yang macam apa? Dalam karangan ini dan banyak tulisan lain, persoalan bahwa Pancasila merupakan pemadatan dari budaya bangsa Indonesia jarang dipersoalkan. Seolah-olah sudah jelas dengan sendirinya apa dan siapa bangsa Indonesia ini.

Untuk itu alangkah baiknya kita membahas dahulu siapakah bangsa Indonesia itu. Bertolak daripadanya kita memasuki lebih lanjut persoalan tentang yang mana khasanah budaya bangsa Indonesia itu, suatu persoalan yang jauh lebih rumit.

b. Bangsa Indonesia dan Budaya Indonesia

Secara literal, kata bangsa berarti kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kata Indonesia menunjuk pada nama suatu negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan Australia.¹⁷ Menurut data tahun 1988, jumlah penduduknya adalah 149 juta, tersebar di 3000 pulau besar kecil yang dihuni di antara 13.677 pulau. Sebagian besar termasuk rumpun Melayu. Suku Jawa yang merupakan mayoritas berjumlah kurang lebih 59 juta. Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia, dihuni oleh kurang lebih 62% dari seluruh penduduk Indonesia. Itulah deskripsi singkat dari bangsa Indonesia yang kemudian mendirikan negara kesatuan Republik bernama Indonesia.

Deskripsi ini tentu mempunyai kesamaan secara garis besar dengan apa yang ada pada tahun 1945-an ketika Sukarno menyebutkan istilah bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia menghuni wilayah yang amat luas. Terbentang di daratan Asia dan Australia. Bukah hanya wilayahnya saja yang luas dan saling terpisah, variasi faktor-

faktor yang membentuk budayanya pun amat luas. Pola kultural Indonesia disusun oleh keberbagaian suku, bahasa, agama, kepercayaan adat istiadat serta kebiasaan. Bangsa ini berdiam di pulau-pulau yang saling terpisah secara geografis, dan tiap daerah mempunyai budayanya sendiri-sendiri yang khas, belum termasuk budaya kaum pendatang (etnis Cina, Arab, India, Belanda). Ada suatu keberbagaian yang ekstrem di antara mereka sejak waktu yang tidak diketahui.

Variasi bahasa bangsa ini juga mengagumkan. Dua ratus bahasa lebih, baik bahasa isolasi maupun bahasa yang dipakai oleh jutaan orang. Keberbagaian agama dan kepercayaan yang ada juga amat kompleks. Penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, berbagai aliran kebatinan dan kepercayaan serta berbagai agama suku dari jaman batu di Kalimantan dan Irian bercampur baur dalam diri anggota bangsa ini.

Semua keberbagaian yang amat luas dan kompleks serta besar itu pantas membuat kita untuk meragukan adanya suatu budaya Indonesia itu sendiri. Sulit untuk mengatakan dan mendeskripsikan apa dan bagaimana budaya Indonesia itu, bila fakta faktor-faktor budayanya adalah semacam di atas.¹⁸

Maka kembali ke permasalahan di atas, bila Sukarno dan interpret-interpret Pancasila yang ada menyebutkan istilah *kekhazanah budaya bangsa Indonesia*, ternyata sulit dijawab apa maksudnya. Sulit menyebutkan secara jelas suatu bentuk kekhazanah tertentu terhadap istilah budaya Indonesia, jika fakta yang ada adalah seperti itu.

Meski tidak ada kepastian yang jelas, ada juga semacam kesatuan nilai-nilai di antara keberbagaian tersebut. Ini tampak dari adanya istilah *nilai-nilai luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia*. Namun, tetap saja sulit mengatakan apakah 'nilai khas Asia (nenek moyang)' itu ada. Disamping itu, tidak mudah merumuskan definisi nilai-nilai tersebut. Beberapa pengamat panggung budaya Asia mencatat ciri-ciri khas sebagai berikut: penghargaan yang lebih kepada stabilitas daripada perubahan, familiasme (keluarga sebagai norma susila tertinggi), kesopanan tatacara demi mencegah pertentangan yang jelas dan menciptakan keselarasan, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain dengan tanpa pamrih.¹⁹

Jadi, meski Sukarno sendiri dengan terang mengatakan bahwa pandangan hidup Pancasila ini berasal dari budaya asli bangsa Indonesia (pra-Hindu), ternyata amat sulit dan hampir tak mungkin melihat asal-usul pandangan hidup ini dari aspek budayanya dan mencari budaya mana. Di samping karena tidak ada sumber historis tentang jaman itu, juga konsep mengenai adanya suatu pola 'budaya bangsa Indonesia' itu sendiri terlalu riskan untuk dikatakan begitu saja.

c. Pokok-pokok Pandangan Hidup yang ada dalam Pancasila

Mungkin memang sulit untuk menelusuri asal-usul pandangan hidup dalam Pancasila tersebut, bila kita langsung mencari lewat siapa dan apa bangsa serta budaya Indonesia itu. Bangsa dan budaya Indonesia adalah konsep yang luas dan kompleks untuk direduksikan dalam sebuah pola. Maka melalui jalan lain kita akan melihat pandangan hidup macam apa yang sebenarnya terkandung dalam Pancasila, dan dari situ mencoba menarik benang asal-usulnya.

Sukarno dalam pidato *Lahirnja Pantja Sila* tanggal 1 Juni 1945, setelah mendeskripsikan macam-macam pandangan hidup yang ada di dunia ini, lalu mulai menguraikan dasar-dasar macam apa yang harus dipakai bagi 'negara buat semua' yang akan didirikan itu. Dasar tersebut haruslah sesuatu yang sudah dibulatkan dalam hati dan pikiran kita. Pertama, ide Sukarno tentang paham kebangsaan; kedua, *national staat* yaitu konsep kebangsaan Indonesia yang bulat dan mengatasi kebangsaan suku-suku diimbangi dengan ide menuju pada persatuan dunia dalam keluarga bangsa-bangsa yang disebut Internasionalisme; ketiga, karena dasar yang mutlak yaitu permusyawaratan dan perwakilan yang termaktub dalam ide tentang demokrasi, boleh berbeda pendapat termuat secara eksplisit; keempat, ia mengemukakan ide kesejahteraan sosial yang menuntut prasyarat mutlak yaitu adanya *politiek-economische - democratie*. Di sini ia mengungkapkan tentang adanya konsep ratu adil, yang menurut Sukarno berarti: *sociale rechtvaardigheid*, yaitu rakyat ingin sejahtera penuh keadilan di bawah ratu adil; kelima, ia mengungkapkan prinsip Ketuhanan yang berarti bahwa segenap rakyat Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan mengamalkannya secara berkeadaban.

Lima macam prinsip itu dinamai Pancasila. Panca berarti lima, dan Sila berarti azas atau dasar. Dan bukannya Panca Dharma. Sukarno kemudian menawarkan, bila anggota sidang tidak menyukai simbolisasi kelima dasar itu ia akan memerasnya menjadi tiga yaitu: Trisila (*socio-nationalisme, socio-democratie, dan ketuhanan*). Bila masih tidak suka, ia akan memerasnya menjadi satu dasar saja yaitu: gotong-royong (suatu perkataan Indonesia tulen, menurut Sukarno). Ia meringkas semua itu dalam suatu Ekasila yaitu 'negara gotong royong' yang menurutnya berarti: *menyelenggarakan karyo, gave pekerjaan amal secara bersama-sama* ... suatu pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Ini semua adalah prinsip yang sudah berkobar dalam dada Sukarno selama berpuluhan tahun. Dan inilah seharusnya *Weltanschauung* negara Indonesia menurut Sukarno, lepas dari apakah anggota sidang setuju atau tidak dengannya.

Suryanto Puspowardoyo dalam Filsafat Pancasila, mengatakan bahwa orientasi dasar Pancasila adalah wawasan ke depan yang integral dan integratif, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial-religius, punya orientasi pada manusia dan kemanusiaan. Orientasi ini selanjutnya akan mewujudkan suatu nilai yang mengkondisikan adanya suasana kehidupan kekeluargaan serta penanaman suatu pola hidup kerakyatan serta mendorong dinamika perjuangan. Mengenai nilai-nilai dalam Pancasila, ia mengatakan bahwa dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang mengeksplisitasikan kemanusiaan serta nilai-nilai yang menunjukkan adanya sifat-sifat integral-etis serta religius.

Tentu saja amat menarik untuk diamati di sini, bagaimana Sukarno sendiri bertitik tolak dari macam-macam idealisme *Weltanschauung* yang ada dalam arus dunia jaman itu, berangkat dari isme-isme besar yang ada dalam *main-stream* pergolakan dunia seperti: liberalisme, sosialisme, komunisme, nasionalisme, dan demokrasi, Sukarno akhirnya sampai ke satu penyimpulan bahwa ide gotong-royong, menurutnya adalah ide yang asli, tulen dari budaya Indonesia sendiri.

Gotong royong sering disebut sebagai salah satu unsur kebudayaan asli yang khas, yang katanya menekankan kolektivisme dan menolak individualisme ala barat. Gotong royong²⁰

kata khas populer di Jawa, menurut penelitian ternyata tidak dikenal dalam sastra Jawa lama atau baru. Istilah ini menurut Koentjaraningrat baru dipakai oleh ahli-ahli pertanian Belanda lulusan Wageningen.

Bagi orang-orang di desa Jawa, gotong royong berarti (1) pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar lingkungan keluarga guna bercocok tanam di sawah, (2) saling membantu antar para tetangga yang berdekatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di sekitar rumah dan halaman atas dasar timbal balik (*do ut des*), (3) di antara pedagang kecil yang merantau, ini berarti tinggal bersama untuk saling melindungi dan membantu selama dirasa perlu, (4) merupakan suatu pekerjaan bersama dalam menyelesaikan suatu proyek yang dianggap berguna bagi masyarakat, negara atau agama tanpa menerima pembayaran. Dalam hal ini gotong royong biasanya juga disebut kerja bakti.

Gotong royong memang terjadi pada jaman nenek moyang kita sesuai dengan kondisi masyarakat agraris saat itu. bahkan masih berlangsung sekarang di desa-desa Jawa. Sistem kerja macam ini sebenarnya mengandung empat konsep: (1) bahwa manusia tidak hidup sendiri, tetapi dikelilingi oleh lingkungan sosial dan alam sekitarnya, (2) manusia pada hakekatnya tergantung dalam semua aspek kehidupan dari sesama manusia, (3) maka ia berusaha mempertahankan hubungan baik dengan sesamanya, dalam semangat persamaan dan persaudaraan, (4) manusia terpaksa menyesuaikan diri, melakukan yang sama dan menjadi sama dengan anggota-anggota masyarakat yang lain.

Ide semacam inilah yang kemungkinan besar dimaksudkan Sukarno sewaktu ia meringkaskan pandangan lima prinsipnya ke dalam suatu ekasila.

d. Lapis Budaya Jawanisme

Sampai sekarang belum sedikitpun tersentuh letak atau pengaruh Jawanisme dalam *Weltanschauung* yang diusulkan Sukarno tersebut. Secara eksplisit memang tidak mudah untuk mengatakan dimana dan dalam bentuk apa ia berpengaruh, tetapi minimal dengan pemeriksaan atas pandangan hidup sebagaimana sudah dibuat di atas, dan dengan mengikuti pembahasan tentang corak khas lapis budaya ini.

Dengan istilah Jawanisme, di sini mau diungkapkan adanya suatu lapis budaya yang khas ada di kalangan suku Jawa. Ini tidak sama dengan istilah kejawaan, ataupun kejawaan.²¹ Sulit untuk mengatakan dan mendefinisikan secara tegas apa itu Jawanisme.

Secara umum unsur-unsurnya bisa ditangkap sebagai berikut. Ada suatu perbedaan besar yang sudah terkenal dan umum, yaitu antara Jawa dan non-Jawa. Yang pertama dilihat pasif dan kedua dilihat dinamis. Itulah sifat yang dominan dianggap ada. Namun lapis budaya ini juga unik. Ketika Islam masuk ke Nusantara, seperti di Aceh, Makasar, Ternate, Halmahera ia bisa berpengaruh di dalam struktur masyarakat dan membawa konsekuensi tertentu atas masyarakat yang memeluknya. Tetapi ketika ia masuk ke Jawa Tengah maka ia tak menjadi akhir dari segalanya yang menentukan aspek hidup orang Jawa. Mereka memang mengaku: "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya", tetapi tetap saja mereka membawa sesaji kepada roh nenek moyang, slametan untuk dewi Sri. Agama sebagian besar orang adalah Jawanisme, suatu way of life. Kita tahu Islam yang fanatik di Jawa mungkin hanya seperempat dari pemeluknya saja. Demikian halnya ketika Hindu masuk Jawa (ia menjadi hindu-Jawa) dan Budha masuk ke Jawa.

Jelas ada sesuatu yang membedakan Jawa dengan yang di luar Jawa. Tetapi faktor pembedanya sendiri sulit dilacak. Untuk mengetahui lapis budaya ini secara detail, mau tak mau kita harus mencari nara sumber dari jaman Jawa kuno; jaman dimana diandaikan ada suatu keluarga primitif Jawa yang belum terpengaruh oleh unsur-unsur budaya luar, yaitu Jawa pra-Hindu.²² Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang hampir tidak mungkin mengingat tidak adanya bukti, peninggalan, atau petunjuk yang bisa diperoleh saat ini. Jelas bahwa sudah sejak dulu Jawa selalu mempunyai tempat yang khusus dalam kepulauan ini sekalipun berbagai perubahan melandanya tetap ia masih ada dan mempunyai identitas khas yang tidak pernah lenyap. Ide luar yang masuk terinkulturasi dan diolah sedemikian rupa sehingga orang Jawa memunculkan suatu yang baru yang tak pernah ada di tempat asal budaya tersebut. Bentuk baru itu telah diwarnai oleh kekhasan orang Jawa. Ada sesuatu yang secara esensial tetap tinggal dalam setiap pergolakan sosial, budaya, dan politis, yaitu nilai-nilai Jawa, cara pandang Jawa terhadap realitas, karakteristik-karakteristik khas Jawa yang tetap ada sebagai

inti, dalam segala kulit budaya Indianisasi, Islamisasi, Westernisasi, dan Internasionalisasi. Ada semacam signal-signal mistis tertentu dari perangkaian tata moral yang mempunyai logika tersendiri dalam hidup orang Jawa. Ada semacam superioritas alam pemikiran²³ khas Jawa dalam kebatinannya terhadap segala pengaruh budaya asing yang masuk. Dan inilah suatu identitas kultural yang menjadi lapis budaya, lapis alam bawah sadar khas Jawa atau Jawanisme.

Lapisan yang tetap sama ini sebenarnya bisa dilacak tanpa harus menyelidiki sumber-sumber naskah kuno. Ia bisa didapatkan dengan melakukan suatu *ngelmu*, yaitu mencari seorang guru untuk berlatih mengenai bagaimana seharusnya kita berpikir, merasa, dan bertindak sebagai orang Jawa. Lapis budaya ini dikenal dengan cirinya yang menekankan suatu rasa keharmonisan dengan seluruh jagad, dimana manusia adalah tokoh yang mempunyai peranan amat penting. Tanpa ia harus terpisah dari jagad itu sendiri, sebagaimana mikrokosmos adalah replika dari makrokosmos. Tugas utama manusia di dunia digambarkan sebagai pemelihara dan penjaga harmoni, keselarasan dari segala apa saja. Harmoni antara rasio dan emosi, pengontrolan konflik dalam diri pribadi, penolakan dan minimisasi konflik sosial. Ini tampak dari kecenderungan umum bahwa masyarakat Jawa menempatkan individu sebagai yang sekunder saja, masyarakatlah yang primer. Hal ini sedemikian rupa sehingga aksi-aksi individu yang dianggap akan mengganggu keselarasan umum akan dipandang sebagai 'seharusnya tidak dilakukan: *ora ilok*'. Manusia dipandang harus mampu *empan papan*, mampu meletakkan dirinya sesuai dengan konteks yang ada. Falsafah hidupnya tidak pernah mengutamakan hak individu, melainkan keselarasan masyarakat yang dijiwai oleh ketentraman bersama.

Bersamaan dengan itu, manusia mempunyai keinginan keras untuk beridentifikasi dengan harmoni itu sendiri. Ia ingin bersatu dengan sang absolut, karenanya secara praktis orang Jawa menempuh jalan mistik untuk mendapatkannya dan akan selalu berusaha untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan yang sudah dilakukannya sesuai dengan harmoni itu. Biasanya, bila orang Jawa merasa tidak mempunyai pengetahuan tentang 'yang benar' itu, ia akan berkonsultasi dengan orang lain yang dianggapnya ahli untuk itu. Maka komponen terpenting bagi orang Jawa adalah kebatinannya, dan inilah yang akan menampakkan diri dalam setiap tindakan lahir. Bukan tata lahir yang penting, melainkan kebersihan

dan kejernihan batin yang akan menjadi faktor kondusif demi tercapainya keteraturan kosmik. Secara hierarkis jiwa dilihat lebih tinggi tingkatannya daripada jasmani yang kasar. Dengan kacamata filsafat Barat, lapis budaya ini mempunyai sifat: platonis, spiritualistis, lebih memuji keluhuran kehidupan spiritual rohaniyah daripada kehidupan kasar jasmaniah.

Pada gilirannya, lapis identitas kulturil ini berpengaruh dan menjiwai secara konsisten segala rangkaian proses sosial, politik, dan kenegaraan di kalangan orang Jawa,²⁴ seperti yang banyak terungkap dalam pemikiran Zoetmulder, Niels Mulder, Magnis Suseno, Harun Hadiwijono, Marbangun Harjowirogo, Reksosusilo, Umar Khayam.

3. Jawanisme Dalam Pancasila ?

Akhirnya, setelah melalui jalan panjang di atas, kita sampai pada masalah pokok yaitu sejauh mana Jawanisme mempengaruhi pandangan hidup Pancasila yang dikemukakan Sukarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Pada prinsipnya memang tak mudah dan tak bisa begitu saja dikatakan bahwa pandangan hidup Pancasila adalah suatu konsepsi *Weltanschauung* dari lapis budaya Jawanisme. Yang bisa dilakukan adalah melihat sejauh mana lapis budaya ini mempunyai peran di dalamnya.

Melihat adanya kesejajaran dalam konsep umum tentang Jawanisme ini, maka unsur-unsur yang termuat dalam falsafah Pancasila adalah sebagai berikut:

- gagasan mengenai hubungan vertikal dengan Tuhan, gagasan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kolektivisme, dan gotong royong, dan
- orientasi dalam Pancasila selanjutnya akan mewujudkan dalam suatu perjudan nilai-nilai yang berupa bentuk iklim kehidupan berimbang, yang menghidupkan suasana kekeluargaan serta penanaman pola hidup kerakyatan dan mendorong dinamika perjuangan,
- (mempertimbangkan adanya berbagai lapis budaya Jawanisme) aspek lain yang khas adalah gotong royong yang sering dianggap sebagai unsur kebudayaan asli, menekankan kolektivisme dan menolak individualisme ala Barat.
- unsur di atas juga memperhitungkan adanya budaya khas Asia yang lebih menghargai stabilitas daripada perubahan,

lebih menekankan keluargaisme (keluarga sebagai norma susila tertinggi), kesopanan tatacara demi mencegah pertentangan dan menciptakan keselarasan, kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain tanpa pamrih. Maka tidak sepenuhnya salah bila dikatakan bagaimanapun Jawanisme mempunyai pengaruh dalam Pancasila. Demikian pula bila kita mengamati pribadi Sukarno, ia adalah juga manusia dari ruang, waktu, dan tempatnya. Oleh karenanya tak bisa ditolak bahwa sebagai pribadi manusia Jawa, segala pola pikir dan tindaknya pasti dipengaruhi oleh lapis bawah sadarnya yaitu Jawanisme.

Akan lebih meyakinkan bila kita mengamati proses interpretasi yang selama ini berlangsung dalam masyarakat Indonesia, entah lewat pandangan-pandangan pemimpin politisnya atau lewat berbagai jargon aktual saat ini. Sebagai ilustrasi berikut ini disajikan beberapa jargon atau ungkapan khusus, misalkan; Bapakisme, ABS, Kekeluargaan, Stabil, Harmoni.

a. Interpretasi Suharto: Selaras-Kekeluargaan-Religius

Menurut Suharto, suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu pandangan hidup atau falsafah hidup sebagai dasar pijak bertindak dan orientasi tindakan dari bangsa itu sendiri. Dengan adanya falsafah, suatu negara akan mampu menentukan pendiriannya sendiri, tidak terombang-ambing oleh berbagai masalah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Maka, Pancasila sebagai pandangan hidup, menurut Suharto, adalah sumber tertib sosial, tertib seluruh perikehidupan individu dan golongan, dan sumber tertib negara dan hukum.

Ia sendiri memandang Pancasila sebagai suatu dasar kerohanian negara dan falsafah bangsa. Pancasila menjadi kepribadian bangsa. Pancasila lahir dari suatu kebudayaan yang mendasarkan dirinya pada kesadaran bahwa akhirnya kebahagiaan manusia tergantung pada tercapainya *keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, serta kemajuan lahir yang dibarengi kehidupan rohaniah.*

Berdasarkan pemikiran di atas, bagi Suharto kesatuan bulat kelima sila dalam Pancasila sebenarnya berisi sebuah kesadaran bahwa manusia pada akhirnya tergantung pada keseimbangan-keseimbangan nilai esensial tertentu, keseimbangan manusia-alam, manusia-masyarakat, manusia-Tuhan, kemajuan lahir-kesejahteraan batin.

Untuk itu masyarakat Indonesia modern atau masyarakat Pancasila yang dicita-citakan, menurut Suharto, adalah masyarakat modern yang serba selaras dan berasaskan kekeluargaan dan religius.²⁵

Suatu pandangan dan interpretasi yang dimaksudkan sebagai upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen tidak bisa dipungkiri memuat pandangan-pandangan kerohanian khas Jawanisme. Secara eksplisit, dalam kamus penataran P4, konsep spiritual Pancasila pun dapat ditemukan dalam kunci pengalamannya, yaitu konsep: pengendalian diri,²⁶ suatu konsep rohaniah saleh yang asketis dan amat sulit dilihat tolok ukurnya.

b. Paternalistik - Bapakisme - ABS

Berkaitan dengan istilah di atas, salah satu gagasan lurus yang diselewengkan adalah konsep kekeluargaan. Konsep kekeluargaan secara ideal kurang lebih mewakili gagasan tentang pola pikir ala Jawanisme, sekaligus mampu menggambarkan bagaimana nilai pandangan hidup Pancasila seharusnya dihayati.²⁷ Penyelewengan dari ide luhur ini ke suatu konsep kekeluargaan yang bersifat paternalistik, yang tidak lain adalah bapakisme, merupakan suatu bentuk feodalisme baru yang tercermin dalam berbagai konsep hubungan kekeluargaan Pancasila. Secara tak langsung tampak memberi kekuatan pada suatu budaya yang khas Jawa. Secara umum konsep ini dikenal juga dengan istilah: Asal Bapak Senang (ABS). Azas kekeluargaan yang terlalu ditekankan sehingga kadang mengesampingkan keadilan dan hak asasi mempunyai eksese begitu mengutamakan harmonisasi dan keselarasan dalam segala hal. Akibatnya nilai individu tidaklah seberharga dengan nilai kolektivitas. Itulah macam-macam bentuk interpretasi yang berkembang sampai sekarang, baik yang resmi dalam dokumen-dokumen TAP MPR tentang P4, maupun yang berlangsung dalam gejala masyarakat kita saat ini terhadap Pancasila.

4. Kesimpulan

Bila menilik sejarah munculnya pandangan hidup Pancasila, secara historis, memang amat sulit untuk melihat adanya pengaruh Jawanisme. Konsepsi Pancasila yang dimunculkan Sukarno tidaklah mendasarkan diri secara eksplicit pada suatu sistem pemikiran filosofis tertentu. Apa yang dia ungkapkan adalah butir-butir yang menurut pengakuannya merupakan berlian dari kalbu bangsa Indonesia sendiri. Meskipun dalam pidatonya Sukarno dengan *luwes* menyebutkan bermacam-macam ideologi dan paham besar yang ada saat itu, namun akhirnya ia tidak mengambil salah satu dari semuanya. Suatu tindakan khas orang Jawa yang sering dituduhkan sebagai sikap *sinkretis* yang serba mudah menerima segala aspek dari luar sekaligus disertai sikap resisten terhadap itu semua, sehingga selalu berusaha memunculkan suatu yang khas Jawa. Ia hanya mengambil unsur-unsur darinya, kemudian digabungkan dengan apa yang ia sebut 'nilai-nilai dari khasanah budaya bangsa', sehingga lahirlah Pancasila yang dengan jelas mampu ia ringkaskan menjadi trisila dan ekasila (gotong royong).

Masalahnya, tidak pernah jelas 'siapakah bangsa Indonesia itu'. Bangsa Indonesia terlalu beraneka ragam dan saling terpisah, maka dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan mengenai kejelasan ciri bangsa atau suku dari bangsa Indonesia, termasuk apa sesungguhnya budaya bangsa Indonesia itu, teramat sulit dijawab. Sebabnya adalah sulit untuk menyelidiki budaya pra-Hindu yang khas Indonesia.

Maka berdasarkan asumsi penulis, bahwa sebagian manusia Jawa Sukarno tidaklah terlepas dari ruang, waktu, dan tempat hidupnya, apalagi mengingat ciri yang amat khas dari budaya Jawa yaitu tampak dari budaya Jawanismenya, apa yang ia pikirkan dan kemukakan pastilah juga bernafaskan Jawa. Asumsi ini diperkuat oleh beberapa kesamaan yang ada di antara apa yang terkandung dalam Pancasila dengan yang menjadi ciri Jawanisme, serta kenyataan yang terjadi secara aktual saat ini, yaitu adanya kemiripan antara interpretasi-interpretasi atau penyelewengan terhadap pandangan hidup Pancasila dengan konsep-konsep dari Jawa. Secara *tentatif*, penulis mencoba menunjukkan bahwa di dalam pandangan hidup Pancasila memang ada unsur-unsur Jawanisme.

Tentu sulit sekali untuk menemukan pertanggungjawabannya bila kita hendak menyimpulkan secara definitif bahwa pandangan hidup Pancasila adalah falsafah yang dipengaruhi oleh Jawanisme. Penyorotan segi pandangan hidup dalam tulisan ini hanyalah dari segi sudut pandang budaya Jawa, belum menyangkut budaya-budaya lainnya.

-oo0oo-

Catatan akhir

1. Dalam sidang BPUPKI pada pagi hari tanggal 1 Juni 1945, untuk pertama kalinya Sukarno mengutarakan dasar/beginsel/philosophische grondslag/Weltanschauung dari Indonesia merdeka. Sukarno mengatakan a.l: "Sesudah anggota-anggota Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai mengeloearkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saja mendapat kehormatan dari Padoeka toean Ketoea yang moelia oentoek mengemoekakan poela pendapat saja ... Padoeka toean Ketoea minta dasar, minta philosophische grondslag atau, djikalau kita boleh memakai perkataan yang moeloek-moeloek, Padoeka toean Ketoea yang moelia meminta soeatoe 'Weltanschauung' di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itoe." (Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila jilid III, hal. 285-286, bdk Pidato Sukarno dalam Lahirnja Pantja-Sila, hal.14)
2. Sukarno berkali-kali menegaskan bahwa ia bukanlah pencipta melainkan 'penggali Pancasila' dari khasanah sejarah bangsa Indonesia. Pancasila baik sebagai satu kesatuan maupun lima silanya satu persatu berakar dalam sosio-budaya bangsa. Sukarno menyatakan pada tanggal 17 Agustus 1954: "Apa yang saja kerdjakan tempo hari, ialah sekedar memformuleer perasaan-perasaan yang ada didalam kalangan rakjat dengan beberapa kata-kata, yang saja namakan Pantja Sila ... saja sekedar menggali didalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian .." (ibid hal 227-278)
3. Lih. Lahirnja Pantja-Sila: Pidato pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, sekarang Presiden Negara Republik Indonesia, Departemen Penerangan RI, 1947, hal. 7-8.
4. ibid hal. 7-13, 14.

5. Dalam pidatonya, Sukarno menyatakan: "Paduka tuan Ketua yang mulia meminta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu ... Tuan-tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan dalam kalbunya rakyat dan merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian bangsa kita serta nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya" (Pres. Suharto, Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 UGM, 1974)
6. Lahirnya Pantja-Sila, hal. 14-16
7. Lih. Ensiklopedi Indonesia hal 95 (tentang Pancasila)
8. Lih. catatan no.2
9. Dalam pidatonya saat sidang BPUPKI 1 Juni tersebut, beberapa kali Sukarno mengatakan: "Maka, yang selalu mendung didalam saya punya jiwa, bukan saja didalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Ziyumi Tyosakai ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah:..." (Lahirnja Pancasila hal.17) "Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka yang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip-prinsip itu" (hal.30), "Sebagai dikatakan tadi, saudara-saudara, itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara-saudara mufakatinja atau tidak, tetapi saja berjoeang sedjak 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu" (hal.31) "Untuk membentuk Nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia..., itulah yang berkobar-kobar didalam dada saya sedjak berpuluh tahun" (hal.31) Bandingkan juga komentar Dr. Radjiman sebagai ketua sidang saat itu dalam kata pengantarnya: "Bila peladjar dan selidiki sungguh-sungguh 'Lahirnja Pancasila' ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Demok-ratish Beginsel ...; suatu Beginsel yang telah meresap dan berurat-berakar dalam djiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari djiwanya setjara spontaan, ..." (hal.5)
10. Lih. Ensiklopedi Indonesia: hal. 94-100
11. Falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Ia lebih sebagai suatu gumpalan sikap batin yang menjadi pandangan hidup seseorang atau suatu masyarakat. Filsafat, dalam KBBI, didefinisikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakekat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya; atau diartikan sebagai: suatu keseluruhan pengetahuan kodrat yang objektif lagi bertalian dan yang telah diperoleh serta disusun secara kritis, metodis, dan sistematis, dengan maksud untuk mencari struktur dasarnya atau sebab yang sedalam-dalamnya bagi bidang-bidang tertentu dari kenyataan dan juga bagi kenyataan sebagai keseluruhan, dengan jalan merenungkan kenyataan tersebut. (Pengantar Teologi, hal.29)

12. Bdk. dengan catatan no.11 tentang arti filsafat
13. Bdk. Catatan no. 11, 12
14. Ldh. Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila hal. 277-278, bdk. Rahmat Subagyo. Pancasila, Dasar Negara Indonesia hal.20, dari Soekarno 'Anjur-anju kepada segenap bangsa Indonesia, (17-8-1954)
15. Juga dalam pemikiran Mr. Soepomo (sebagai ahli adat), yang menurut M. Yamin diucapkan dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, memuat beberapa dasar yang dianggap cocok dengan kebudayaan dan semangat kebatinan Indonesia, misalnya persatuan antara pemimpin dan rakyat, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong.
16. Sukarno sendiri, pada waktu kemudian memperjelas soal asal-usul pandangan hidup Pancasila tersebut sbb: "Sebaliknya saya berkata: penggalian saya itu sampai zaman sebelum ada agama Islam. Saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu. Masyarakat Indonesia itu boleh saya gambarkan dengan saf-safan ... Saf pra-Hindu, yang pada waktu itu kita telah menjadi bangsa yang berkultur dan bercita-cita. Berkultur sudah. Beragama sudah, hanya agamanya lain dengan agama sekarang, bercita-cita sudah". Sukarno menyebutkan bahwa budaya tanam padi, alfabet ha-na-ca-ra-ka-da-ta-sa-wa-la dan wayang kulit itu merupakan contoh budaya yang sudah ada sejak pra-Hindu. "Jadi saya menggali itu dalam sekali, sampai ke saf pra-Hindu ... Saya lantas gogo (gogo itu seperti orang mencari ikan, di lubang kepiting) sedalam-dalamnya sampai menembus zaman imperialis, menembus zaman Islam, menembus zaman Hindu, masuk ke dalam zaman pra-Hindu" (buku Pancasila sebagai Dasar Negara, Sukarno, hal. 35-36, 47)
17. Lih. Kamus Besar Bahasa Indonesia hal. 76, 330. Arti lebih jelasnya, nama "Indonesia: diturunkan dari nesioi (Yun) atau nusa (Sansk) yang artinya pulau-pulau atau kepulauan Indonesia. Nama ini digunakan pertama kali oleh G.N. Earl dalam arti: Indonesians untuk penduduk nusantara, lalu dipakai oleh I.R. Logan dalam arti geografis, oleh A. Bastian dalam arti etnologis, dan akhirnya oleh Perhimpunan Indonesia (1922) dalam arti politis. (Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila, hal. 142)
18. Bdk. The Cultural Background of Indonesian Politics ,oleh P.J. Zoetmoel der SJ (hal. 4-8)
19. Bdk. Ensiklopedi Politik Pembangunan Indonesia hal. 253-254
20. Gotong-menggotong (kata Jawa) berarti beberapa orang bersama membawa barang yang berat; Royong berarti membagi hasil kerja secara adil, sesuai dengan besarnya sumbangan yang diberikan. Jadi, istilah gotong royong mengandung dua unsur; bekerja bersama-sama (lebih-lebih pekerjaan berat, yang tak mungkin dilaksanakan seorang diri), lalu bersama-sama

pula menikmati hasil pekerjaan secara adil. (Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila hal.76, tentang Gotong royong)

21. Kejawen (atau sering disebut sebagai Agami Jawi) adalah salah satu dari varian Islam Jawa, diperbandingkan dengan kaum santri, Islam puritan) yang merupakan suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu Budha yang cenderung ke arah mistik. Sedangkan istilah Kejawen, cenderung kepada suatu istilah yang menunjukkan adanya identitas dari suku Jawa (bdk. keindonesiaan-nya tipis, Ensiklopedi Indonesia, hal. 368-371, tentang Jawa, Suku bangsa).
22. Menurut Claire Holt, Periodisasi sejarah di Indonesia adalah sbb: (1) Masa pra-historis; yang meliputi jaman batu tua, batu tengah dan batu muda; (2) Masa penyebaran agama Hindu: abad 1 atau 2 M - 6 M; (3) Masa Islam; mulai lk thn. 1250; (4) Kedatangan Barat: abad 16 sampai 1945; (5) Jaman kemerdekaan. Maka kalau kita mau mendugai adanya suatu jaman pra-Hindu, kita harus kembali ke periode waktu sebelum abad 1 atau 2 M. (Art in Indonesia, Claire Holt)
23. Dalam konteks budaya Jawa, yang dinamakan "berpikir" adalah menggali (dari kata dasar gali = hati). Jadi aktivitas berpikir bukanlah aktivitas rasional, sebagaimana di Barat, melainkan aktivitas yang lebih menggunakan rasa dan hati. Bila suara hati orang Barat adalah akal budi, maka rasa sejati orang Jawa adalah lubuk batin. Rasa bagi orang Jawa bukanlah suatu perasaan emosi atau sentimentalisme, melainkan suatu inti yang menjadi norma terdalam dan patokan yang harus ditaati. (Konsepsi Tentang Manusia Dalam Kebatinan Jawa, Dr. Harun Hadiwijono; bdk. pula Etika Jawa Dalam Tantangan, Murni-Suseno dan S.Reksosusilo)
24. Menarik kiranya untuk melihat di sini bahwa dua pemimpin top dalam hierarki politik Indonesia yang saling kontras (Sukarno dan Suharto), dalam segala kepandaian dan kehebatan yang mereka miliki sehubungan dengan ilmu politik dan kenegaraan, masih biasa berkonsultasi dengan seorang soothsayer (tukang ramal; guru). Kita melihat bahwa mereka itu bertindak sesuai dengan karakter khas Jawa mereka. (The Cultural Background of Indonesian Politics oleh P.J. Zoetmoelder SJ)
25. Pandangan Suharto ini amat selaras dengan isi dari Naskah Lengkap Perdoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dalam bab II: "Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniyah" (dari Tap MPR No.II/MPR/1978 dalam Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila, hal. 267-268)

26. "Ekaprasetya ..., manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat .. kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa" (diambil dari no.5 Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari naskah lengkap P4, Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila, hal. 271-272)
27. Kekeluargaan dalam arti tepat mementingkan keselarasan antara kepentingan an perorangan dan kepentingan masyarakat. "Di dalamnya juga dapat dicegah penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah ... Di dalamnya juga terkapdug sikap dasar, bahwa kepentingan dan keselamatan bersama yang didahulukan ... Kelompok yang besar maupun yang kecil pada akhirnya dan secara sadar menundukkan diri kepada kepentingan bersama ... Karena Pancasila menempatkan keselarasan antara perorangan dan masyarakat lingkungannya, ... maka harus dapat berkembang penghargaan terhadap hak-hak pribadi dengan segala kesempatan untuk mengembangkan kepribadian dan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri; namun yang sekaligus dengan penuh kesadaran ditundukkan secara suka rela kepada kepentingan umum. (Pidato Presiden Suharto, 15-2-1975, Dies Natalis UI)

-oo0oo-

Daftar Pustaka

1. Departemen Penerangan RI, *Lahirnja Pantja - Sila*. Djakarta, 1947.
2. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
3. Hadiwijono, Harun. *Konsepsi Tentang Manusia Dalam Kebatinan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
4. Hardjowirogo, Marbangun. *Manusia Jawa*, Jakarta: Idayu, 1983.
5. Krissantono (ed.). *Pandangan Presiden Suharto Tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1976.
6. Mulder, Niels. *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1983.
7. Notonagoro. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*, Djakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh, 1968.

8. Puspowardodjo, Suryanto. *Filsafat Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 1989.
9. Rose, Mavis. *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. (terj. oleh Hermawan Sulistyono) Jakarta: Gramedia, 1991.
10. Sukarno. *Ideologi, Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
11. Sukarno. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Inti Idayu Press - Yayasan Pendidikan Sukarno, 1984.
12. Suseno, Magnis dan Reksosusilo, S. *Etika Jawa Dalam Tantangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
13. Yayasan Cipta Loka Caraka. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (jilid I - IV)*, Jakarta, 1983.
14. Zoetmoelder, J. *The Cultural Background of Indonesian Politics*, Columbia: Institute of International Studies the University of South California, 1967.



FILSAFAT PANCASILA DRIYARKARA

Y. Sudriyanto dan E. Priyanta

Pendahuluan

Melihat perjalanan bangsa Indonesia selama ini ada yang menyatakan bahwa ada kesenjangan antara Pancasila sebagai etika dengan pelaksanaannya.¹ Mereka mensinyalir bahwa apa yang dicita-citakan dalam Pancasila masih jauh dari yang ingin diwujudkan. Fenomen ini memberi pertanda adanya sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dalam hubungannya dengan hidup politik di negara kita, khususnya secara langsung berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi (*ideology of state*) maupun sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*).

Selain karena ingin menanggapi kesenjangan itu tulisan ini juga diharapkan bisa menjadi bantuan untuk mengerti secara mendalam mengenai Pancasila. Lebih lanjut pengertian itu diharapkan dimiliki secara sadar, bahkan sampai pada kesadaran bahwa Pancasila menjadi bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Setelah sampai pemahaman secara *kognitif* dan *afektif*, diharapkan berlanjut sampai tingkat kehendak (*voluntif*) yang akhirnya mendarat ke perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari.²

Tulisan ini menawarkan suatu penjabaran atas pemikiran Driyarkara mengenai Pancasila, di samping penjabaran atas Pancasila yang dibuat oleh banyak orang lain seperti Noto Nagoro, Roeslan Abdul Gani maupun Soerjanto Puspowardoyo. Pada bagian akhir tulisan ini kami menambahkan sedikit komentar baik atas pemikiran Driyarkara mengenai Pancasila maupun relevansinya untuk situasi Indonesia sekarang.

1. Siapa Prof. Dr. N. Driyarkara

a. Riwayat hidup

Nikolaus Driyarkara semula bernama Suhirman dan kemudian lebih dikenal dengan nama Driyarkara dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1913 di Kedunggubah, Purworejo, Kedu, Jawa Tengah. Ia lahir di tengah kekentalan budaya Jawa, dalam situasi itulah ia dibesarkan, tidak mengherankan kalau warna kebudayaan Jawa dominan dalam pemikiran-pemikiran filosofisnya. Kita bisa mengenali Driyarkara selain sebagai orang Jawa juga sebagai pemikir dan rohaniwan dalam ordo Serikat Yesus.

Sebagai pemikir ia menampakkan kesan *luwes*, *sederhana* tanpa mengurangi mutu dan bobot intelektualnya. *Luwes* karena ia tidak menutup dan mengurung diri dalam bingkai kesenangan maupun bakat akademisnya semata-mata. Sebaliknya, ia adalah seorang intelektual yang peka dan tanggap sehingga selalu sedia untuk memberikan tanggapan atas situasi dan kondisi konkret pada masanya. Juga tidak segan-segan memberikan sumbangan arah pemikiran untuk masa depan selama delapan tahun terakhir sampai betul-betul bakat intelektual dan kekuatan badannya diambil Tuhan. Prof. Dr. Christ Verhaak melihat fenomena ini sebagai ciri kesejatian Driyarkara sebagai seorang pemikir. Ia berani memberikan sumbangan pemikiran yang sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan situasi dunianya. Ia menampakkan disposisi dasar sebagai seorang pemikir yang tetap terbuka terhadap dunia luar.³

Sederhana, tanpa mengurangi mutu dan bobot intelektualnya karena ia tidak mulai berfilsafat dengan mengajukan terminologi filsafat yang sulit dan asing bagi kebanyakan orang. Christ mengatakan bahwa Driyarkara mampu memasukkan pembaca atau pendengarnya ketika ia memberikan siara radio ke dalam dunia pemikiran filsuf baru saat itu seperti Edmund Husserl, Sartre, Scheler, Heidegger maupun James yang waktu itu sama barunya dengan literatur terakhir dari Habermas, Gadamer, Foucault, Derrida maupun Levinas.⁴

Sebagai seorang rohaniwan Driyarkara terlihat sangat konsisten dengan apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Dalam tulisannya *Pancasila dan Religi*⁵ aspek itu amat jelas terlihat. Ia meyakini bahwa Tuhan adalah prinsip pertama dari realitas. Dan, kepada Tuhanlah manusia mengarahkan

diri sebagai kepenuhan terakhir. Apa yang ia yakini dan hayati, terasa kuat mewarnai banyak tulisan maupun pembicaraannya.

Riwayat pendidikan formal di Seminari Menengah di jalani di Yogyakarta dari tahun 1929--1935. Tahun berikutnya masuk novisiat Serikat Yesus di Girisonta, masa untuk menginternalisasikan semangat dan cara hidup serikat yang dipilihnya. Pada tahun 1935 kembali ke Yogyakarta untuk menempuh studi filsafat. Ditahbiskan sebagai imam oleh Mgr. Soegiyapranata, SJ pada tanggal 6 Januari 1947 setelah menyelesaikan studi theologi di Muntilan. Pada tahun itu juga lalu dikirim ke Belanda untuk memperdalam theologi di Maastricht sampai tahun 1949. Setelah selesai masa tersiat yaitu pendidikan akhir di dalam Serikat Yesus ia pindah ke Roma untuk studi filsafat di Universitas Gregoriana. Selesai pada tahun 1952 dengan gelar doktor dalam bidang filsafat dengan disertasi mengenai Nicolas Malebranche.⁶

Sekembalinya dari Roma ia mengajar filsafat di Kolese St. Ignatius Yogyakarta, sekaligus memimpin majalah kebudayaan BASIS. Pada tahun 1957--1967 menjadi rektor pertama IKIP Sanata Dharma, guru besar di Universitas Indonesia dan Universitas Ujung Pandang serta Hasanudin, pada tahun 1963--1964 menjadi dosen juga di St. Louis Amerika Serikat. Di samping itu ia juga menjadi anggota MPRS wakil Golongan Karya (1962--1967) dan anggota DPA (1965--1967). Akhirnya pada tanggal 11 Februari 1967 wafat dengan tenang di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta.

b. Garis besar perkembangan pemikiran filsafat

Membaca tulisan Driyarkara baik mengenai pendidikan, kebudayaan, manusia, negara dan bangsa maupun pandangannya mengenai Pancasila akan nampak bahwa pemikiran-pemikiran filsafatnya selalu bertitik tolak dari uraian mengenai falsafi manusia.⁷ Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai pandangannya atas Pancasila perlulah kita menengok sejenak konsep permenungannya atas manusia dan juga perkembangan metode filsafatnya.

Periode awal ditandai dengan pendekatan yang bersifat spekulatif. Christ mengatakan bahwa Driyarkara sangat berminat pada cara pemikiran Hegel dan juga Blondel. Hal ini nampak dalam disertasi Driyarkara tentang teori partisipasi dari Malebranche. Melalui disertasi itu ia berhasil menggali

secara mendalam dan kritis paham Malebranche mengenai hubungan manusia dengan Allah ditinjau dari sudut filsafat. Salah satu pokok disertasinya mau menjawab pertanyaan: apakah manusia sanggup melihat segala-galanya seakan di dalam Allah karena mengambil bagian di dalamnya.

Periode kedua ditandai dengan pendekatan fenomenologis-dialektis atau diistilahkan dengan fenomenologis berlingkaran oleh Christ. Hal yang sama dikatakan juga oleh Mudji Sutrisno, dan ditambahkan bahwa ada sambungan benang merah yang tiap kali berupa kumparan-kumparan pengalaman eksistensial manusia sebagai titik tolaknya.⁸ Ciri pengalaman eksistensial itu selalu dinamis dan aktif memberi arti kepada lingkungan sekitarnya. Sekaligus bersifat dialektis. Filsafatnya menjadi kesinambungan dari satu permenungan dikembalikan dalam lingkaran-lingkaran pembahasan, lalu membuahkan titik baru yang menjadi titik sumber permenungan baru. Titik renung baru ini dikembangkan melalui proses dialektis yang sama dan akan menghasilkan titik renung baru lagi yang semakin mendalam.

Seperti juga tulisan-tulisan lainnya, uraian mengenai Pancasila dikembangkan juga dengan pola pemikiran yang menggulir perlahan-lahan, tahap demi tahap.⁹ Orang diajak masuk dengan enak ke dalam pemikiran Scheler mengenai pokok pertanyaan siapakah manusia itu. Menyusuri juga pemikiran Leibniz yang menyarankan bahwa untuk mengerti manusia dalam kesatuannya dengan segala sesuatu, atau kadang juga diajak menikmati perkembangan diri dan penemuan diri menurut konsep dari Hegel. Tidak ketinggalan pula ditawarkan sumbangan Heidegger yang menyatakan bahwa perealisasi diri manusia berada dalam kebersamaannya dengan sesamanya, sampai juga pada Thomas Aquinas dengan konsep tanah air sebagai prinsip adanya individu. Dan, akhirnya kembali kepada Max Scheler dengan konsepnya tentang manusia sebagai kristalisasi cinta kasih Tuhan.

Pelan-pelan dan tahap demi tahap orang diajak untuk masuk dalam pembahasan melingkar. Berangkat dari setiap pokok dalil filsafat Pancasila menurut garis alur pemikirannya sendiri. Menjadi kentara sekali adanya kesinambungan antara setiap pokok yang ada di dalamnya. Dari kelima sila itu terlihat adanya sambungan benang merah yang memperlihatkan satu pokok sebagai ikat sintesis yang akan menjadi sintesis baru pada pokok berikutnya. Metode tahap demi tahap

yang berdialektis inilah yang membuat pembaca maupun pendengarnya ketika melakukan siaran di radio mudah mengikuti jalan pemikirannya. Di samping itu pilihan kata-kata yang menyodorkan nuansa-nuansa baru namun tetap gampang dan tepat menjadi daya tarik tersendiri.

2. Gagasan-gagasan Pokok Filsafat Pancasila

a. Perikemanusiaan

Permenungan filsafatnya mengenai Pancasila diawali dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang mengusik Scheler: apakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realitas? Manusia tidaklah berdiri sendiri, bukan sebagai *monade*, terpisah dari lingkungan dan dunianya, demikian pendapat Leibniz. Dalam pengertian itulah manusia harus dimengerti. 'Aku' harus selalu dimengerti dalam kesatuannya dengan segala sesuatu. Diri manusia tidak akan bisa dimengerti tanpa mengaitkannya dengan segala sesuatu yang melingkupinya. Segala sesuatu itu adalah alam jasmani dan manusia lain.

Driyarkara setuju dengan prinsip dialektik Hegel. Ia mengambil prinsip ini untuk menerangkan bagaimana manusia seharusnya memperkembangkan diri, yaitu bahwa ia harus keluar dari diri sendiri dan bersatu dengan alam. Driyarkara meyakini kebenaran dialektis ini, yaitu bahwa justru dengan 'menjulur', dengan 'mengeluar' dari diri sendiri manusia menemukan dirinya sendiri.

Manusia yang punya keterikatan dengan jasmaninya bersifat potensial supaya betul-betul menjadi manusia ia harus memanusiakan diri sendiri. Itu harus dilaksanakan dalam kesatuannya dengan alam. Sebagai seorang pribadi yang mempribadikan dirinya dalam kesatuan dengan alam itulah manusia disebut membudaya. Kebudayaan merupakan hasil dialektis perpaduan dunia jasmani dengan diri manusia sendiri. Menurut Driyarkara cara hidup manusia bersifat dialektis-rohani karena hidup berarti menjasmani untuk akhirnya merohani sebab manusia merupakan persona rohani. Berdasarkan jalan pemikiran ini Pancasila berarti jalan untuk mempribadi dan memanusiakan diri sesuai tuntutan kodratnya.

Aspek kedua untuk memahami manusia adalah melihatnya dalam keterkaitan atau kesatuannya dengan manusia lain. Ada kita berupa ada bersama (*Sein, Mit-sein*). Prinsip dasar hubungan antar manusia adalah cinta kasih. Cinta, bila

manusia taat dan menjalankan kodratnya dan benci bila kodrat itu diingkari. Ada bersama seharusnya berarti ada bersama dengan hormat dan cinta kasih.

Oleh karena itu hidup berarti merealisasikan kesatuan dengan alam jasmani dan berada bersama dengan sesama manusia (*in der Welt, liebendes Mit-sein*). Dapat juga dikatakan menjasmani adalah cara berada manusia, dan mengaku atau mengkita adalah unsur kemanusiaannya.

b. Keadilan sosial dan demokrasi

Perikemanusiaan harus dilaksanakan dalam suatu bidang kehidupan, yaitu ekonomi dan bidang penyelenggaraan perlengkapan dan syarat-syarat hidup sejauh itu tergantung dari barang-barang material. Eksistensi manusia berhadapan dengan dunia jasmani, ini harus langsung ditujukan untuk ada bersama. Jadi dia harus mempribadikan diri secara bersama. Usaha semakin mempribadikan diri sendiri sekaligus juga berarti mempribadikan dan memanusiakan orang lain.

Manusia menurut kodratnya adalah ada bersama, dengan sendirinya akan timbul masyarakat. Masyarakat merupakan pelaksanaan dari *liebendes Mit* atau ada bersama dengan cinta kasih. Jika kelompok masyarakat semakin besar terbentuklah negara. Sama seperti masyarakat, menegara juga berarti pelaksanaan ada bersama dengan cinta kasih. Namun bahaya kegagalan ada bersama dengan cinta kasih lebih besar maka diperlukanlah prinsip demokrasi atau kerakyatan. Makin langsung merupakan pelaksanaan cinta kasih makin kurang diperlukan demokrasi, begitu pula sebaliknya. Jadi posisi penting demokrasi adalah untuk menghindari bahaya kegagalan negara sebagai ada bersama dengan cinta kasih.

Isi demokrasi adalah bahwa negara harus dipandang sebagai persona dengan seluruh keluhurannya sebagai pribadi dengan semua hak-haknya. Dengan kata lain demokrasi dapat didefinisikan sebagai prinsip yang menyebabkan para warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan bekerja sama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan semua kepentingan bersama.

c. Kebangsaan

Ada banyak faktor yang mendorong manusia merealisasikan ada bersama dengan membangun kelompok. Dalam hidup bersama

itu terbentuklah kebudayaan yang sama, kesadaran yang sama, perasaan yang sama dan cara-cara hidup yang sama yang disebut tanah air.

Bagaimana hubungan tanah air dengan adaku sebagai manusia? Hubungan itu ternyata sangat erat. Tanah air adalah prinsip adaku. Kebangsaan lahir dari eksistensi manusia sebagai ada bersama. Berada selalu berarti berada sebagai putera tanah air, kebangsaan adalah suatu cara ada bersama. Menegara berarti penegaraan dari suatu bangsa. Kebangsaan menjadi dasar penegaraan sejauh bangsa itu merdeka dan menegara. Merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa lain, dan bebas untuk merealisasikan ada bersama dengan cinta kasih. Menegara berarti memperkembangkan bangsa sebagai kesatuan kultural, ekonomis, geografis dan sejarah.

De jure masyarakat manusia itu meliputi seluruh jenis manusia maka dari kodratnya nasionalisme akan semakin menuju internasionalisme. Di sini perkembangan manusia mendapat arti yang khusus, yaitu hubungan antar bangsa yang lebih mondial akan semakin baik.

Keempat sila tersebut dapat diringkaskan pentahapannya sebagai berikut. Timbulnya empat sila itu memang dari kodrat manusia, dan rincian empat sila itu adalah ada bersama dengan cinta kasih sebagai awalnya. Dalam cara berada itulah terkandung arti perikemanusiaan. Perikemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam masyarakat dalam hubungan - nya dengan penciptaan perlengkapan dan syarat-syarat hidup sehingga melahirkan keadilan sosial. Pemasyarakatan sebagai realisasi perikemanusiaan dilaksanakan dengan cara yang wajar, menyangkut peraturan dan pembentukan suatu struktur. Itulah demokrasi. Karena ada manusia berarti ada bersama maka orang memasyarakat dan timbullah bangsa dan kebangsaan. Nampaklah sekarang bahwa keempat sila itu pada dasarnya satu asal yaitu cinta kasih, atau ada bersama dengan cinta kasih dan itu harus dijalankan dan ditaati.

d. Ketuhanan

Tuhan adalah realitas pertama, namun manusia tidak mengerti dalam kesadaran yang terang. Dalam kesadaran dan pengertian manusia mengakui sebagai yang serba terhubung dengan alam jasmani. Dalam pengertian itu ia mengerti bahwa dirinya dan barang-barang di dunia ini serba terbatas, relatif, tergantung, terjadi, tidak niscaya dan tidak mutlak adanya. Dalam pengertian itu tersirat Tuhan. Untuk mengerti

Tuhan manusia berpangkal pada pengertiannya tentang alam dan diri sendiri. Hanya dengan berpikir betul-betul ia akan mengerti bahwa dirinya sendiri bukanlah ada yang mutlak dan sejati. Akhirnya, ia harus mengakui bahwa ada yang sejati adalah Tuhan.

Kelima sila tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri dan sila ketuhanan menjadi dasar dari sila-sila lainnya. Hal ini dapat diterangkan dengan dua cara, yaitu dari pihak Tuhan dan dari pihak manusia.

Pertama, dari pihak Tuhan. Sila-sila itu menjadi bersifat mutlak karena makhluk adalah perwujudan cinta kasih Tuhan. Taat kepada wujud kita sebagai perwujudan cinta kasih itu berarti taat kepada Tuhan Yang Ada sebagai Maha cinta kasih. Tuhanlah yang berdialektik. Jadi, semua sila dijiwai cinta kasih Tuhan sehingga sila-sila itu bersifat mutlak dalam arti tidak bisa disangkal kebenarannya karena diasalkan dari pengalaman akan Allah sendiri.

Kedua, dari pihak manusia. Ada kita berupa ada cinta kasih yang aktif mengarah kepada sesama manusia lain dan kepada Tuhan. Tetapi mengapa mengarah kepada Tuhan? Justru karena berasal dari Tuhanlah adanya cinta kasih itu, maka mengarah kepada Tuhan merupakan kehausan cinta kasih itu. Pancasila itu sebenarnya cinta kasih yang tidak lain adalah cinta kasih yang berasal dari Allah dan kembali menyatu dengan Allah.

3. Disposisi Dasar dan Kontekstualitasnya

Dalam permenungan mengenai Pancasila ini Driyarkara berpijak pada keyakinan bahwa Pancasila sudah merupakan kebenaran fundamental. Tidak ada lagi unsur yang muncul dari prinsip kesangsian atau keraguan, dan tulisan-tulisan mengenai Pancasila bukan dimaksudkan sebagai tulisan apologetik. Ia menyumbangkan pandangannya tentang Pancasila dari sudut filsafat dengan satu tujuan agar lebih meyakini dan mengerti kekayaan yang terkandung di dalamnya dan karena itu akan lebih mencintainya. Ia sendiri menyatakan pada awal tulisannya bahwa ia mau mengadakan renungan bersama tentang Pancasila. Rupanya bagi Driyarkara istilah permenungan sebenarnya dirasakan lebih cocok ketimbang dikatakan berfilsafat Pancasila.

Driyarkara menegaskan bahwa berpikir mengenai Pancasila bukan berarti menyangsikan kebenarannya melainkan justru terdapat keyakinan akan kebenarannya sehingga terdorong

untuk mengadakan permenungan lebih dalam atasnya. Kebenaran justru akan menjadi semakin kokoh dan teguh setelah dipikirkan, dicari alasan-alasannya kedudukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia mengharapkan supaya dengan menyadari dan meyakini secara mendalam kita dapat berdiri sendiri dengan aktif dan bebas. Bertitik tolak dari sikap itu kita dapat mempertahankan Pancasila dari macam-macam aliran secara bertanggung jawab. Di samping itu Pancasila akan sanggup menjadi prinsip pemecahan dan sumber inspirasi di kala ada kesulitan.

Kontekstualitas pemikiran filosofis ini terletak pada pemaknaan yang harus dijalankan manusia bersama terhadap alam lingkungannya termasuk sesama dan dunianya. Titik tolak semua usaha itu adalah eksistensi dan koeksistensi manusia dan kemanusiaan. Tidak mengherankan kalau sampai pada simpulan macam itu karena titik tolak sejak awal dari permenungan adalah kodrat manusia itu sendiri. Dalam diri Driyarkara Pancasila adalah *inherent* atau melekat dalam eksistensi diri manusia.

Perikemanusiaan menjadi akar dialektik dalam Pancasila yang melahirkan keadilan sosial sejauh perikemanusiaan dilaksanakan dalam suatu bidang atas dasar cinta kasih. Kumpulan perikemanusiaan yang ketiga melahirkan demokrasi sejauh perikemanusiaan dilakukan dalam proses masyarakat. Kumpulan kemanusiaan keempat memunculkan kebangsaan sejauh itu dilakukan dalam kesatuan dengan tanah air yang punya keterarahan kepada internasionalisme. Akhirnya, proses dialektis itu memadat dan bermuara pada gerak 'mencari Tuhan' sebagai puncak kehidupan manusia yang menyangkut religi sebagai tuntutan total. Demikianlah kerangka pokok filsafat Pancasila yang dapat digali dari tulisannya yang berjudul *Pancasila dan Religi*.

Dalam tulisan mengenai Pancasila yang kedua yang berjudul *Kembali ke Pancasila*, ia tidak lagi membuat kupasan dialektis melainkan menawarkan lima kategori tematis yang hendaknya dijadikan kategori operatif. Bahkan itu dipertajam dengan terminologi 'kategori imperatif' Kant.¹⁰ Isi tulisan kedua ini menggarisbawahi apa yang telah dikatakan dalam tulisan pertama terutama pokok bahwa Pancasila mengandung nilai religi yang merupakan tuntutan kodrat manusia. Bukan hanya merupakan kategori tematis melainkan juga memuat kategori imperatif.

4. Pancasila sebagai Hukum Kodrat

Driyarkara telah memberi landasan alasan Pancasila memuat pemenuhan hukum kodrat. Namun sejauh mana kita bisa menafsirkan hukum kodrat dalam konteks ini? Apa pembatasan anggapan sebagai hukum dan sesuai dengan tuntutan kodrat? Hukum dalam arti luas adalah seperangkat aturan yang dijadikan ukuran perbuatan yang mengarahkan perbuatan-perbuatan kepada tujuan yang semestinya. Dalam arti sempit hukum adalah aturan moral yang ada dirinya sendiri punya sifat mewajibkan.¹¹

Ricardo Antonich menerangkan hukum kodrat dengan membedakannya dengan hukum positif. Hukum positif adalah seperangkat aturan yang mengikat yang dikenakan pada masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh mereka yang berkuasa.¹² Hukum kodrat terdiri dari rangkaian norma-norma apriori yang mendahului dan berada di atas hukum positif, yang memberikan kewajiban-kewajiban dalam segala kasus yang tidak diramalkan oleh para pembuat hukum positif, dan yang menyingkirkan semua nilai yuridis dari setiap hukum positif yang bertentangan dengannya. Lalu ditarik pengertian bahwa hukum kodrat merupakan tuntutan-tuntutan etis yang diturunkan secara langsung dari pribadi manusia, yaitu tanpa pengantara suatu hukum positif.¹³ Hukum kodrat berakar dari pengalaman primordial akan suatu panggilan untuk melakukan apa yang seharusnya ada untuk pemenuhan diri. Akan tetapi isi konkret dari panggilan ini hanya dapat diketahui berdasarkan makna hidup manusia dalam sejarah.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimak gagasan pokok tentang apa itu sebenarnya hukum kodrat.¹⁵ Pertama, hukum kodrat merupakan prinsip-prinsip pertama kodrat manusia untuk memperkembangkan eksistensi manusia untuk mencapai pemenuhan diri karena manusia adalah makhluk yang bersifat potensial. Kedua, hukum kodrat bernilai universal dan tetap. Ia muncul dari aktualitas tuntutan-tuntutan yang mendalam dari pribadi manusia yang melampaui konteks sejarah tertentu ke dalam konteks sejarah yang ada. Jadi di satu pihak hukum kodrat bersifat historis karena aktualitas tuntutan kodrat itu harus terlaksana konkret dalam waktu dan ruang. Di lain bersifat metahistoris karena mengatasi konteks historis tertentu.

Bagaimana Pancasila dipandang sebagai hukum kodrat oleh Driyarkara? Menurut Driyarkara, Pancasila bukan saja merupakan prinsip-prinsip pertama yang bernilai universal dan tetap yang di dalamnya termuat nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Pancasila lebih lagi, karena nilai-nilai kemanusiaan itu dihadapkan kepada Tuhan sebagai kebenaran tertinggi. Pancasila terlahir dari perjumpaan bangsa Indonesia dengan kebenaran Tuhan. Aspek inilah yang menjadikan Pancasila bukan hanya mau menggambarkan realitas kemanusiaan (*what is to be*), melainkan juga bahwa kemanusiaan itu harus direalisasikan (*what ought to be*). Alasan pembenaran yang paling mendasar ialah bahwa hal itu dikehendaki oleh wibawa Allah. Demikianlah Pancasila menampakkan kekokohnya sebagai hukum kodrat.¹⁶

Dari sudut filsafatnya, Driyarkara memandang Pancasila sebagai hukum kodrat yang harus dilaksanakan guna mewujudkan pemenuhan kemanusiaan diri dan sesama. Langkah pertama adalah mewujudkan perikemanusiaan dengan cara menjalankan ada bersama dengan cinta kasih. Langkah kedua adalah mewujudkan keadilan sosial dengan cara menjalankan kemanusiaan dalam kebersamaan mengusahakan sarana untuk hidup. Langkah ketiga adalah mewujudkan demokrasi dengan cara menjalankan perikemanusiaan dalam kesatuan karya. Langkah keempat adalah mewujudkan kebangsaan dengan cara melaksanakan perikemanusiaan dalam hubunganku dengan kesatuan. Langkah kelima adalah mewujudkan gerak kepada sumber ada yang mutlak sebagai dasar pelaksanaan dari perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan.¹⁷

5. Komentar

a. Sebuah uraian filosofis yang ketat

Dapat disimak bahwa alur pemikiran dari keseluruhan pemikiran Driyarkara tentang Filsafat Pancasila dibangun secara sistematis, logis, dan amat ketat. Ia menggunakan konsep-konsep yang masih sangat umum sekaligus mendasar. Ia sangat setia untuk menggulirkan pemikirannya dalam tataran teoritis murni dan tiap-tiap kali berusaha menghindari untuk masuk ke dalam pemikiran praktis. Maka pentinglah mengertinya dalam batas konteks uraian teoritis-filosofis murni dalam usaha memahami filsafat Pancasila-lanya.

b. Gambaran manusia dan masyarakat Pancasila

Uraian filosofisnya tentang Pancasila juga mengandung pandangan yang sangat dinamis tentang manusia. Manusia menghayati cara keberadaannya di dunia ini secara unik. Ia itu subjek yang sadar akan dirinya, alam jasmani, dan sesamanya. Ia memberikan pemaknaan di dalam dan kepada dunia serta menjalankan makna di dalam dunia. Ia menghayati keberadaannya itu dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah awal dan tujuan (*alpha dan omega*) keberadaan manusia. Ia mengada dengan merealisasikan diri sebagai manusia dari Allah (*man of God*) dan manusia menuju Allah (*man to God*). Begitulah kurang lebih gambaran dasar manusia Pancasila Driyarkara yang melukiskan pula secara implisit gambaran masyarakat Pancasila atau negara Pancasila secara utuh dan lengkap dalam batas pemikiran teoritis-filosofis-murni.

c. Eksplisitasi aspek kemanusiaan

Gagasan sentral tentang eksistensi manusia (perikemanusiaan) yang sangat mewarnai uraian filosofisnya tentang Pancasila ini bukanlah ide yang baru sama sekali. Gagasan tersebut merupakan eksplisitasi yang disusun secara lebih terang, logis, dan sistematis dari rumusan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD'45 alinea keempat, yang secara implisit sudah mengandung warna kemanusiaan yang sangat kental.

d. Perlu tinjauan kritis

Pancasila merupakan suatu tuntutan kodrat yang harus dipenuhi bila manusia atau masyarakat dan negara mau sampai kepada kepenuhan. Karena hukum kodrat, maka Pancasila bersifat universal. Artinya, bahwa Pancasila bukanlah milik bangsa Indonesia saja. Oleh karena itu, kiranya perlu sebuah tinjauan secara kritis apakah Pancasila merupakan hasil kebudayaan Indonesia atau kebudayaan universal atau bisa kedua-duanya. Bagaimana perbedaan di antara keduanya dapat dijelaskan? Apakah cukup sah mengklaim bahwa Pancasila adalah wakil ke-Indonesia-an? Demikian pula dengan ungkapan-ungkapan berikut ini. *Pancasila sudah tertanam dalam kalbu rakyat Indonesia sejak berabad-abad. Pancasila adalah kepribadian bangsa. Pancasila adalah jati-diri bangsa Indonesia ...dst.* Penulis sendiri mengakui keunggulan bangsa Indonesia karena Pancasila telah dirumuskan pertama kalinya sebagai Dasar Negara. Namun, pernyataan tersebut tidaklah mencukupi

untuk membenarkan klaim seperti di atas. Semuanya ini dihardirkan bukan untuk menyatakan ketidaksetujuan, melainkan bahwa masalah-masalah seperti ini perlu ditelaah secara kritis sehingga justru akan memperkokoh pemahaman masyarakat Indonesia secara benar dan tepat mengenai Pancasila.

e. Situasi Indonesia dan posisi Pancasila

Pada tahun 1900-an ini dunia ditandai era globalisasi ekonomi yang sangat berpengaruh dalam percaturan dunia. Sebagai ilustrasi kecil dapat dipaparkan indikasi globalisasi tersebut. Ketegangan-ketegangan dunia berangsur-angsur menipis. Negara-negara mulai mengarahkan diri untuk perkembangan ekonomi yang mapan. Kemajuan ekonomi negara-negara Barat mendorong Rusia meninggalkan sistem komunisnya dan mencari sistem yang lebih cocok untuk memperbaiki dan mengejar ketinggalan ekonominya. Ideologi menjadi bersifat relatif sejauh masih mampu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Rupanya ekonomi telah menjadi tolok ukur kemajuan pada masa kini. Namun, manusia juga makin menyadari bahwa dirinya bukanlah manusia ekonomi saja. Ia ingin mencari identitas dan mendambakan kualitas. Munculah perhatian mencolok kepada nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi manusia yang juga sangat mewarnai *trend* sejarah dewasa ini.¹⁸

Mau tidak mau Indonesia juga terkena pengaruh global tersebut. Dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 1990, Presiden Soeharto mengajak bangsa Indonesia untuk bersiap-siap memasuki era Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua sebagai Era Kebangkitan Kedua. Era Kebangkitan Pertama telah melahirkan penemuan jati-diri bangsa. Sedangkan Era Kebangkitan kedua yang berlangsung dalam era globalisasi ini, akan ditandai oleh munculnya kecenderungan ke arah keterbukaan dan kebebasan, internasionalisme, pluralisme, demokratisasi dan perubahan-perubahan nilai yang mendasar.¹⁹

Dalam situasi yang pekat dengan pengaruh globalisasi inilah, Pancasila sebagai ideologi bangsa mendapat tantangan. Maka, untuk menilai efektif tidaknya atau perlu tidaknya ideologi, harus dinilai dari sejauh mana aktualisasi ideologi Pancasila tersebut dapat dibuktikan. Menurut pemikiran Driyarkara, tolok ukur penilaiannya tentu terletak pada eksistensi dan koneksistensi manusia dan kemanusiaan. Itu

berarti bagaimana bangsa Indonesia masih memberikan tempat bagi udara segar kebebasan, keterbukaan, demokrasi, komunikasi dan informasi terbuka, hidup kebersamaan dan keterjalinan dalam suasana pluridimensionalitas, dan cara hidup dialektis-positif. Semua ini kiranya menjadi hal yang sangat mendesak karena masyarakat kita semakin progresif untuk kemajuan dan penghormatan martabat kemanusiaan. Dan tuntutan keadaan ini kiranya menjadi hal yang sangat logis karena Pancasila kini bukan lagi hanya sebagai *konsensus nasional*, namun terlebih telah menjadi *sistem nasional* yang memang harus terbukti keunggulannya dalam aktualisasi konkret.²⁰

Penutup

Kiranya, tidak terlalu berat untuk membenarkan pendapat Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas bukan sebagai masalah politik, melainkan sebagai suatu sistem baru. Dengan kata lain, Pancasila sekarang merupakan sebuah "*sistem yang sifatnya wajib dan mendesak untuk dijalankan atau dioperasionalkan*" karena ia adalah sebuah hukum kodrat. Dan sifat *mendesaknya* itu kiranya akan menjadi semakin kuat dengan melihat tuntutan eksistensi dan koeksistensi manusia dan kemanusiaan pada masa kini. Munculnya pejuang-pejuang untuk eksistensi dan koeksistensi kemanusiaan pada masa kini di negara Indonesia memberikan warna dan indikasi tersendiri yang pantas diperhitungkan dalam era transformasi sekarang ini. Sebab jika tidak, justru akan semakin mengalienasikan diri manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Dan tentunya, situasi sekarang ini sudah cukup untuk menggugah masyarakat Indonesia untuk bersikap jujur dan konsekuen terhadap keyakinan nasional Pancasila.

Sebagai kata penutup, kiranya tidak ada jeleknya mengutip anjuran Driyarkara sendiri untuk melaksanakan eksistensi dan koeksistensi manusia dan kemanusiaan (Pancasila).

"Apakah yang bisa kita lakukan untuk memperkembangkan PANCASILA dalam diri kita masing-masing dan dalam masyarakat? Perhatikanlah bahwa Pancasila adalah corak yang terpokok untuk kepribadian Indonesia, bahwa Pancasila tercantum sebagai ideologi dan cita-cita kita. Pancasila tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirongrong oleh ideologi manapun juga. Pancasila tidak boleh menjadi semboyan yang kosong belaka."²¹

Catatan akhir

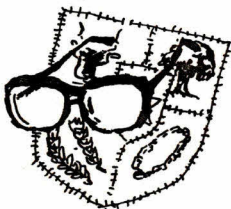
1. Pendapat ini dilontarkan oleh JACOB UTAMA (KOMPAS) dalam kesempatan Dialog Nasional dalam rangka memperingati 46 tahun kemerdekaan Republik Indonesia oleh PPK Kogoro tanggal 29 Agustus 1991 (KOMPAS, 30 Agustus 1991). Lontaran pernyataan Jacob Utama ini kemudian ditanggapi oleh MURSIITO dengan artikelnya yang berjudul "Menjumbuhkan Etika Pancasila dengan Pelaksanaannya" (KOMPAS, 12 September 1991). Dalam tulisannya ini, ia secara terus terang mengakui kebenaran dari hasil dialog nasional yang diprakarsai oleh PPK Kogoro tersebut. Kemudian Mursito menawarkan jalan penyelesaian untuk menjembatani antara teori dan praksis dari Pancasila. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu ditatapkan pada kenyataan konkrit. Oleh karena itu, Pancasila haruslah berupa ideologi terbuka.
2. Tiga lapis struktur pemikiran ini kita temukan secara mencolok dalam pandangan Driyarkara tentang manusia. Sejalan dengan pemikiran Driyarkara tentang manusia ini, Driyarkara selalu menekankan aspek keterjalinduan ketiga aspek tersebut untuk suatu aksi konkrit yang membuahkan apa yang kita sebut dengan kebudayaan (Lih. Driyarkara, PERCIKAN FILSAFAT, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1978, Cet. III; bdk. Driyarkara, "Driyarkara tentang Manusia", Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980).
3. Lih. Prof Dr. Christ Verhaak SJ, "Gagasan Sentral dan Perkembangan Driyarkara" (BUNGA RAMPAI MENGENANG PROF. DR. DRIYARKARA SJ DAN PEMIKIRAN FILOSOFISNYA, Senat mahasiswa STF Driyarkara Jakarta, 1988, cet. I, hal. 12-28).
- 4 ibidem.
5. "Pancasila dan Religi" ini adalah sumber paling pokok yang diperlukan penulis untuk menyusun tulisan ini. Artikel tersebut adalah prasaran yang diucapkan yang diucapkan pada Seminar Pancasila di Yogyakarta, tanggal 17 Februari 1959. Bersama dengan enam (6) artikel lainnya, telah dikumpulkan dalam sebuah antologi yang diterbitkan oleh Penerbit Kanisius (1980) dengan judul DRIYARKARA TENTANG NEGARA DAN BANGSA. Oleh Departemen Penerangan RI, tulisan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "Pancasila and Religion" guna disebarkan ke luar negeri melalui perwakilan-perwakilan RI di luar negeri. Tulisan lain yang masih berkaitan langsung dengan pembahasan Pancasila adalah tulisan yang berjudul "Kembali ke Pancasila" (termuat juga dalam Driyarkara, DRIYARKARA TENTANG NEGARA DAN BANGSA, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980). Tulisan kedua tersebut adalah prasaran untuk Simposium "Kebangkitan Angkatan 1966" di Aula Universitas Indonesia tanggal 6 Mei 1966.

6. Bdk. B. B. Triatmoko SJ, "Pemikiran Driyarkara dalam Filsafat Manusianya (BUNGA RAMPAL, hal. 68-70).
7. Bdk. studi yang dibuat oleh Christ Verhaak dalam tulisan "Gagasan Sentral dan Perkembangan Pemikiran Driyarkara" dan Mudji Sutrisno dengan artikelnya yang berjudul "Kunci Permenungan dan Warna KeIndonesiaan Pemikiran Driyarkara" (BUNGA RAMPAL).
8. Lih. Mudji Sutrisno, BUNGA RAMPAL, hal. 30.
9. Bdk. Christ dalam BUNGA RAMPAL hal.15.
10. Kant membedakan antara dua macam perintah, yaitu perintah bersyarat (imperatif hipotetis) dan perintah tak bersyarat (imperatif kategoris). Perintah bersyarat adalah perintah yang berlaku apabila orang menhendaki apa yang menjadi sayaratnya. Sedangkan perintah tak bersyarat yang mau ditunjuk oleh Kant adalah perintah-perintah moral yang pada dirinya bersifat mutlak atau absolut, tidak bisa ditawar-tawar dengan kepentingan atau kesenangan pribadi. Rupanya Driyarkara menggunakan istilah "kategori imperatif" ini mengacu kepada jenis perintah yang kedua, yaitu imperatif kategoris (lih. "Kembali ke Pancasila" dalam BUNGA RAMPAL hal. 67; Franz Magnis-Suseno, ETIKA DASAR, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990, hal. 56-57).
11. Poespoprodjo, FILSAFAT MORAL, KESUSILAAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK, Bandung Remadja Karya, 1986, hal. 149-160.
12. Hukum positif, menurut Poespoprodjo, dibedakan menjadi dua macam: hukum positif deklaratif dan hukum positif determinatif. Hukum positif deklaratif adalah aturan-aturan dalam bentuk perkataan yang diturunkan dari hukum kodrat. Hukum positif determinatif hanya melengkapi hukum kodrat Ia menyajikan cara-cara bertindak sesuai hukum kodrat (Poespoprodjo, hal. 215-227).
13. Lih. Richardo Antonich, IMAN DAN KEADILAN, AJARAN SOSIAL GEREJA DAN PRAKSIS SOSIAL IMAN, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991, hal. 62-63.
14. Ibidem, hal. 68.
15. Hukum kodrat menurut arti moral Kristiani adalah partisipasi rasional pada hukum abadi. Hukum kodrat ini semacam "moral code" dari prinsip-prinsip moral. Hukum abadi adalah rencana kebijaksanaan Tuhan yang mengarahkan makhluk ke tujuan yang untuk itu Tuhan telah menciptakan manusia. Hukum kodrat ini ada karena Tuhan sudah semestinya membimbing manusia ke tujuan dengan sarana yang cocok atau selaras dengan kodrat manusia. Sarana itu haruslah berbentuk sebuah hukum yang mengikat secara internal. Ia tidak berubah. Ia karya Sang Pemberi Undang-Undang Yang Sempurna, yang Dia sendiri tidak kenal perubahan (Poespoprodjo, hal. 161-179); bdk. Richardo Antonich, hal. 62-63.

16. Karena Pancasila secara hakiki merupakan hukum kodrat, maka negara Indonesia yang berasas-dasarkan Pancasila bukanlah negara agama ataupun negara profan. Pancasila itu adalah religi-universal. Ia bukan milik golongan agama tertentu dan ia juga bukan tandingan agama. Ia itu semacam bentuk "common ground morality", suatu konsensus bersama dari semua golongan agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia untuk hidup bersama men-bangsa dan me-negara (bdk. DRIYARKARA TENTANG NEGARA DAN BANGSA, hal. 62-63).
17. Langkah-langkah ini bukan penulis maksudkan sebagai langkah bertahap dengan susunan prioritas nilai mana yang harus didahulukan dan yang terpisah-pisah dan terkotak-kotak, melainkan sebagai suatu gerak bersama dan serentak sesuai dengan bidang tertentu yang berkaitan secara langsung dengan sila-sila Pancasila.
18. Lih. John Naisbitt dan Patricia Aburdence, MEGATRENDS 2000, Jakarta: Binarupa Aksara, 1990.
19. Lih. Sudibjo, "Era Kebangkitan Nasional II" dalam UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA (Hadi Soesastro, edt.), Jakarta: CSIS, 1991, hal. 351-363.
20. Istilah konsensus nasional dan sistem nasional penulis pinjam dari Kuntowijoyo dalam tulisannya yang berjudul "Dari Integrasi Nasional ke Sistemisasi Nasional" dalam TRANSFORMASI MASYARAKAT INDONESIA, J.A.Denny (edt.), Kelompok Study Proklamasi, 1986, hal. 38-45. Dalam tulisannya itu, ia membadi sejarah nasional menjadi tiga babakan periode Periode pertama disebut Pra-Nasional (s.d. 1908), periode kedua Nasional (1908-1985), dan periode ketiga Pasca-Nasional (1985-sekarang). Semenjak tahun 1985, yaitu semenjak diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, integrasi vertikal antara negara dan masyarakat sudah tercapai penuh. Sedangkan integrasi horisontal antara berbagai kekuatan dalam masyarakat sendiri sudah tercapai dengan integrasi konstitusional dengan dimulainya pembentukan perhimpunan partai-partai politik yang mendukung kemerdekaan. Tahun 1985 adalah tonggak bersejarah yang penting yang menandai tercapainya integrasi nasional horisontal dan vertikal. Setelah ini, mulailah sejarah baru, Pasca-Nasional berupa proses mencari sistem nasional. Lebih lanjut ia menyarankan untuk memahami situasi sekarang dalam kecenderungan ke arah sistemisasi. Begitu juga dalam melihat Pancasila. Pancasila juga mesti dipahami sebagai sistem nasional yang harus diterjemahkan ke dalam teori sosial.
21. Lih. Driyarkara, "Mencari Kepribadian Nasional" dalam DRIYARKARA TENTANG NEGARA DAN BANGSA, hal. 29.

Daftar pustaka

1. Denny, J.A., (edt.), *Transformasi Masyarakat Indonesia*, Kelompok Studi Proklamasi, 1986.
2. Driyarkara, N., *Percikan Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1978, (cet.III).
3. _____, *Terdapat Kesenjangan antara Pancasila sebagai Etika dan Pelaksanaannya*, KOMPAS, 30 Agustus 1991.
4. Mursito, *Munjumbuhkan Etika Pancasila dengan Pelaksanaannya*, KOMPAS, 12 September 1991.
5. Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
6. Naisbitt, John dan Patricia Aburdence, *Megatrends 2000*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1990.
7. Poespoprodjo, L.PH. S.S., *FILSAFAT MORAL, Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Karya, 1986.
8. Richardo Antonich, *Ajaran Sosial Gereja dan Praksis sosial Iman*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
9. Senat Mahasiswa STF Driyarkara, *Bunga Rampai Mengenang Prof. DR. N. Drijarkara, SJ dan Pemikiran Filosofisnya*, Jakarta: Seksi Publikasi, 1988.
10. Sudibjo, *Era Kebangkitan Nasional II*, dlm. *UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA*, (Hadi Soesastro edt.), Jakarta: CSIS, 1991.



APA KATA MEREKA TENTANG PANCASILA?

Tim Redaksi

(Setyo, Wira, Sudri dan Hendra)

Pengantar redaksi

Ada usaha untuk memasyarakatkan Pancasila dan menjadikannya sebagai asas tunggal. Namun ternyata sering usaha itu hanya menyentuh kelompok tertentu. Berdasarkan keprihatinan itu tim redaksi mewawancarai 40 responden dari kalangan masyarakat kecil dan mahasiswa.

Data yang diperoleh diklasifikasi dan diulas dengan sedikit bantuan literatur mengenai Pancasila. Dua unsur mencolok dari gagasan dan harapan responden diolah tim penyunting. Tulisan ini lebih dimaksudkan untuk memaparkan fakta sosiologis yang ada. Akhirnya, ditutup dengan kesimpulan tentatif yang terbuka untuk ditanggapi.

1. Rangkaian Pendapat tentang Pancasila

Berawal dari pertanyaan spontan, umum, sederhana dan terserah mau dijawab apa responden mulai diwawancarai. Ternyata dari kegiatan ini lahir berbagai ide dan pandangan yang di luar dugaan.

Seorang tukang kayu, misalnya menjawab dengan pasti bahwa Pancasila bisa disamakan dengan Pandawa Lima. Kalau mau baik hasilnya maka sila-silanya harus dijalankan sebagai satu kesatuan; jangan dipisah-pisahkan. Secara tidak langsung dengan latar budaya Jawa coba digali makna sila-sila Pancasila. Memperkuat pandangan budaya ini, beberapa responden menyatakan bahwa Pancasila merupakan prinsip yang cocok untuk semua orang, khususnya bangsa Indonesia karena berakar pada kebudayaan Indonesia dan nilai-nilainya sudah ada dalam tiap diri manusia Indonesia. Nilai-nilainya bermakna

universal karena sudah hidup dalam diri tiap orang. Maka, bagi mereka Pancasila pasti mampu membuat masyarakat rukun, bersatu, saling menghormati, menghargai hak-hak orang lain, dan mengatur hubungan dalam masyarakat. Katakanlah, Pancasila menjadi patokan hidup untuk mengatur bangsa dan negara Indonesia. Tepatlah kalau seorang tukang batu menyatakan kalau Pancasila sangat khas Indonesia. Begitu mendengar Pancasila ia langsung teringat Indonesia. Demikian menurut mereka, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berakar dari khasanah budaya bangsa, sehingga dengan melihatnya orang langsung mengingat Indonesia.

Berbeda dengan pandangan di atas, dua orang juru masak sepakat bahwa Pancasila lahir karena peristiwa G 30 S/PKI. Tanpa Pancasila kerusakan dan peperangan semasa PKI akan muncul lagi. Dan, lebih mengerikan lagi Undang Undang Negara akan kacau dan hancur kalau tidak ada Pancasila. Sebut saja Pancasila sebagai penyelamat dari bahaya PKI. Wajarlah kalau Pancasila dianggap sakti dan selalu menjamin adanya perdamaian, demikian komentar seorang pramuniaga.

Mungkin saking cintanya akan perdamaian atau karena alasan tahu sama tahu, sementara orang tidak mau memberi banyak komentar terhadap Pancasila. Ada nada mereka lebih suka memilih dian daripada dicap subversif, PKI, anti pemerintah oleh kelurahan atau siapa saja. Bahkan ada yang merasa bahwa pembicaraan dan pemikiran tentang Pancasila hanyalah urusan pemerintah, ide orang atas dan yang pernah sekolah tinggi. Orang kecil, karena bodoh, asal tahu saja dan menjalankan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Lebih ekstrem lagi ada yang kebingungan campur takut ketika ditanyai tentang Pancasila. Paling-paling mereka hanya memberi jawaban berbau menghindar atau memperlihatkan wajah penuh keheranan. Alasan yang sering dimunculkan adalah: tidak tahu, belum pernah mengerti, sudah lupa semua, sibuk mencari makan, tidak siap, malu, takut diinterogasi, tidak tahu artinya karena merasa bodoh dan lain sebagainya. Inilah jawaban yang paling sering dilontarkan.

Berbeda dengan 'masyarakat kecil' mahasiswa mengakui keluhuran nilai-nilai Pancasila. Tetapi secara jelas mereka menilai bahwa pelakunya seringkali brengsek sehingga nilai-nilai baik itu tidak diamalkan. Bahkan menurut mereka banyak kontradiksi dan inkonsistensi antara kata dan perbuatan para pemimpin yang seharusnya memberi teladan dalam pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai bukti beberapa

fakta disodorkan. Sebut saja misalnya penindasan orang kecil lewat penggusuran tanah, penggarukan becak, ABRI 'main sikat' dan lain sebagainya.

Sikap ini berkembang lebih jauh ketika sekelompok mahasiswa yang jadi responden mengeluh terhadap pelaksanaan penataran P4. Rasa bosan itu ada karena sejak SD sampai Perguruan Tinggi selalu 'dijejelin' pelajaran Pancasila dan P4. Akan semakin memuakkan kala melihat banyak para penatar tidak konsisten antara kata dan perbuatan serta hanya mencari tambahan di masa tua dengan menjadi manggala.

2. Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan Hidup

a. Pengertian

Falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling umum dimiliki setiap orang atau masyarakat. Falsafah merupakan pandangan hidup atau gumpalan sikap batin yang menjadi patokan hidup seseorang atau suatu masyarakat. Gumpalan sikap batin tersebut sudah dirumuskan pertama kalinya sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa pada essensinya dimaksudkan sebagai pegangan untuk bertindak bijaksana sehari-hari oleh seluruh warga dalam kelompok yang disebut dengan bangsa Indonesia.

Karena menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia maka dapat dikatakan juga bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk melaksanakannya. Dengan demikian semakin nyata bahwa Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang memang berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia.

b. Pedoman hidup ideal

Dalam lingkup pandangan 'masyarakat kecil' terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup secara spontan dipandang sebagai pegangan atau norma yang fungsinya mengatur hubungan antar sesama warga dalam masyarakat, bangsa dan negara. Mereka yakin bahwa Pancasila mampu membuat masyarakat rukun, bersatu, saling menghormati, menghargai hak-hak orang lain dan lain sebagainya. Keyakinan ini diperkuat dengan panda-

ngan bahwa Pancasila berakar pada nilai-nilai yang sudah melekat erat dalam diri setiap manusia. Atas keyakinan ini mereka berani menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang akan mengatur hidup mereka bersama sebagai rakyat. Konsekuensinya, mereka harus bertindak seturut nilai-nilai yang dipegang sebagai falsafah hidupnya.

Apa yang menjadi falsafah itu harus dipegang dan didukung tekad untuk mewujudkannya. Rasanya hal ini tidak sulit, karena mereka meyakini bahwa Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mereka tinggal menghayati dan mengamalkannya tanpa harus mempelajari sesuatu yang baru.

Secara spontan mereka berpendapat bahwa apa yang menjadi falsafah bangsa Indonesia pada dirinya sendiri adalah baik. Pancasila ada sebagai kebaikan. Ia mempunyai klaim universal mengatasi penilaian baik-buruk dari kelompok atau golongan tertentu. Karena ciri adanya sebagai kebaikan universal, Pancasila *in potentia* memungkinkan untuk menjadi pengatur hubungan antar warga dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai macam kelompoknya.

Mereka sampai pada penemuan alasan bahwa pembenaran yang paling fundamental atas ciri adanya Pancasila sebagai kebaikan universal berada di balik pernyataan bahwa Pancasila sudah melekat dalam diri setiap manusia. Dengan kata lain, Pancasila bisa diartikan sebagai *hukum kodrat* setiap orang.

Ciri fundamental Pancasila sebagai hukum kodrat akhirnya membawa pada pemahaman kritis bahwa Pancasila bersifat mutlak untuk dilaksanakan bila manusia ingin mencapai kepeenuhan secara moral. Berdasarkan pemikiran inilah mereka menilai bagaimana kelompok di luar mereka menjalankan Pancasila tanpa menyajikan ilustrasi perbandingan tentang bagaimana kelompok mereka sendiri menghayati dan mengamalkan Pancasila. Dengan demikian Pancasila tidak hanya bersifat lebih memungkinkan melainkan juga berwujud sebagai pandangan falsafah hidup bangsa.

c. Penyimpangan dalam kenyataan

Ternyata ada kesenjangan antara idealitas dan praksis di sana-sini. Pancasila sebagai pedoman tingkah laku belum dilaksanakan secara benar. Sementara mahasiswa yang berbekal pendidikan dan keberanian menilai bahwa para 'pengajar Panca-

sila' justru inkonsistensi antara apa yang mereka katakan (anjurkan dan ajarkan) dan apa yang mereka lakukan. Sebagai bukti mereka menunjuk pada kasus-kasus penindasan rakyat kecil baik secara ekonomis maupun politis, seperti tukang becak, peran militerisme dengan gerakan mengutamakan kekuatan dan adanya kesenjangan sosial. Fenomen tersebut tersebut menjadi bukti bahwa terdapat banyak 'penyelewengan' yang semestinya tidak terjadi. Apakah bisa dikatakan bahwa penyelewengan itu terjadi karena nilai-nilai Pancasila tidak dihayati dan diamalkan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bertindak? Ataukah Pancasila tinggal sebagai sebuah konsep bagi bangsa dan negara Indonesia yang jauh sekali dari praksisnya? Meskipun tidak bisa disangkal bahwa mereka juga seringkali menyimpang dari pandangan hidupnya dalam hidup sehari-hari.

Akhirnya, kita mempertanyakan apakah Pancasila tetap sanggup menjadi sebuah konsensus etis yang mampu melawan nafsu merusak yang telah menggejala secara luas dan bukan malah melegitimasi, dan sanggup menjadi sistem kontrol sosial yang harus diterjemahkan ke dalam organisasi yang mampu menciptakan mekanisme yang baik untuk bekerja sama, saling menolong dan menghargai, dan suasana dialektis positif dalam alam pluriformitas dalam segala bentuknya ini. Dengan kata lain, apakah masih ada orang yang berani dan konsekuen untuk menghayati *way of life*-nya dan yang telah menjadi *spirituality of politic* manusia dan bangsa Indonesia.

3. Pancasila sebagai Ideologi dan Praksis

a. Pengertian

Konsensus asali dari *the founding fathers* NKRI sewaktu pembentukan negara Indonesia menyatakan bahwa secara primer dan sudah sejak semula Pancasila merupakan dasar negara. Primer baik dalam arti maksud dan tujuannya semula maupun dalam arti fungsinya semula.

Dasar negara sebagai *fundamental foundation of state* mencakup dan memancarkan pola rangkaian sistem pemikiran, cita-cita dan keyakinan bulat yang kait mengkait secara logis. Sedangkan pengertian ideologi, secara harafiah adalah pengucapan dari apa yang terlihat, atau pengutaraan dari apa yang terumus dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran. Dalam arti luas dan pada umumnya, ideologi diterima sebagai

suatu pemikiran mengenai teori politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Maka dalam artian tertentu dasar negara dapat diistilahkan sebagai ideologi negara.

Sebenarnya ideologi walaupun berasal hanya dari pemikiran satu orang atau lebih, pada kenyataannya tidak terlepas dari kenyataan yang hidup di masyarakatnya mengingat bahwa sang pemikir tadi hidup dalam masyarakat tertentu. Jadi, suatu pemikiran menunjukkan kenyataan yang hidup dalam masyarakatnya. Akhirnya, masyarakat itu sendiri akan dipengaruhi oleh hasil pemikiran tersebut.

Bagaimana dengan Pancasila? Sudah jelas bahwa apa yang disebut di atas semua berkaitan dengannya. Pancasila adalah satu-satunya dasar negara kita. Dialah yang menjadi *fundamental foundation of state* mencakup dan memancarkan pola rangkaian sistem pemikiran, cita-cita dan keyakinan bulat bangsa. Dialah yang menjadi dasar pemikiran dari semua teori politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pancasila bukanlah sesuatu yang datang dari awang-awang. Ia selalu mempunyai klaim bahwa ia adalah urat nadi, akar jiwa dan sukma serta kepribadian masyarakat Indonesia. Jadi dalam makna-makna sebagaimana disebut di atas, nilai-nilai dasarnya Pancasila amat fundamental bagi keberlangsungan ini.

b. Komunis phobia?

Karena letak pentingnya itulah dalam rangka melestarikan serta maksud melaksanakan secara murni dan konsekuen, secara praktis pemerintah Orde Baru banyak melakukan usaha pemasyarakatan. Lebih-lebih setelah peristiwa G 30 S/PKI yang merongrong Pancasila sebagai ideologi. Gerakan ini sudah sewajarnya ditumpas karena mau mengganti dasar negara dengan ideologi komunis. Ini bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia. Memang peristiwa itu sudah berakhir namun rakyat dan pemerintah harus waspada terhadap bahaya laten.

Berbagai usaha pemberantasan sisa-sisa G 30 S/PKI dilancarkan dengan usaha penangkalan bahaya laten, bersih dilakukan terus. Tidak mengherankan kalau di kalangan masyarakat terjadi keresahan dan anti yang berbau komunis terutama PKI. Sementara itu pemerintah Orde Baru melancarkan usaha agar Pancasila semakin merakyat entah dengan penataran, penyuluhan atau usaha lainnya. Bagaimanakah pandangan mereka terhadap Pancasila dalam kerangka usaha-usaha tersebut?

Spontan beberapa responden mengatakan Pancasila sebagai penyelamat bangsa dari bahaya PKI. Maka Pancasila dilihat sebagai sesuatu yang sakti yang mampu membawa keluar dari ketakutan dan penderitaan menuju ketentraman. Ada yang berpendapat tanpa Pancasila Undang Undang negara tidak dapat berjalan baik. Di sini nampak keyakinan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang diyakini dan dijunjung tinggi.

Ketentraman dan perdamaian bagi mereka mengandaikan keadaan serba teratur dan tercukup kebutuhannya. Segala kesulitan hidup dan kerjanya tidak akan terjadi jika Pancasila benar-benar dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian Pancasila dimengerti sebagai ideologi yang membimbing segala bentuk kebijaksanaan pemerintah menuju pelaksanaan pembangunan yang menguntungkan banyak pihak. Meskipun tidak dapat diingkari bahwa harapan mereka tetap tinggal harapan karena seringkali kenyataan berbicara lain.

Lewat wawancara kelihatan adanya kengerian jaman PKI dan segala penangkalannya cukup membekas di dalam diri responden. Ada juga kesan takut-takut dalam bicara soal Pancasila. "Sudahlah jangan bicara macam-macam, nanti kena tuduh subversif atau PKI oleh kelurahan atau orang lain.", ujar salah seorang dari mereka. Tidak mengherankan kalau ada banyak reaksi yang muncul ketika mereka diwawancarai. Mereka sendiri terus terang mengatakan bahwa sebagai 'orang kecil' cukup hanya tahu saja dan menjalankan apa yang ada. Bahkan menurut mereka yang paling penting adalah mencari nafkah. Persoalan dan pemikiran tentang Pancasila adalah urusan 'orang atas'. Lebih aneh lagi tidak sedikit yang ketika ditanya memunculkan aneka reaksi: merasa diinterogasi dan takut, kaget dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka mengatakan tidak tahu entah karena sudah lupa, tidak pernah memikirkannya atau memang benar-benar tidak tahu.

c. Penataran P4 dan Bidang Studi Pancasila

Mungkin orang bisa sedikit melupakan kesan yang timbul di kalangan masyarakat kecil di atas. Tetapi bagaimana dengan para mahasiswa yang sudah cukup lama terdidik menanggapi usaha pemasyarakatan Pancasila lewat penataran P4 dan bidang studi Pancasila. Mereka umumnya melontarkan rasa bosan terhadap segala bentuk dan materi pelajaran sekitar Pancasila yang diberikan sejak SD sampai Perguruan Tinggi.

Penataran P4 dilaksanakan dengan rasa terpaksa karena merupakan syarat kelulusan. Penyampainnya terasa tidak pernah berkembang dan ada kesenjangan bahasa penyampaianya dari penatar kepada petatar dari kalangan mahasiswa. Rasa bosan ini makin bertambah ketika menyaksikan dalam praktek hidup ada inkonsistensi pada mereka yang seharusnya memberikan teladan baik. Jadi dapat dikatakan mereka hanya menerima secara formal tetapi penghayatannya kosong. Ada bahaya rasa bangga dan rasa memiliki dan pengertian bahwa Pancasila itu baik hanya ada di tingkat pikiran saja dan tidak berdampak pada tingkah laku. Atau lebih parah lagi malah akan semakin terkikis habis. Inilah yang kiranya menjadi kendala usaha pemasyarakatan Pancasila. Tidakkah lebih baik kalau usaha pemasyarakatan yang memang perlu itu diperbaiki sistem dan instrumennya?

Apa yang dikeluhkan bukannya Pancasila dan nilai-nilainya, terus terang mereka mengakui dan menjunjung tinggi, namun adanya kesenjangan yang dinilai masih terlalu jauh dan instrumen pemasyarakatan yang masih harus diperbaiki. Atau menurut teori nilai Kluckhohn nilai dasarnya sudah baik sedangkan nilai instrumental dan nilai akhirnya menyimpang.

4. Kesimpulan

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup diyakini oleh masyarakat. Akan lebih baik lagi kalau kita mengikis habis segala penyimpangan nilai pandangan hidup Pancasila. Fenomen di atas menampakkan bahwa sebagai ideologi bangsa makna Pancasila belum ditangkap sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tertentu. Kelompok mahasiswa yang diwawancarai menangkap Pancasila dari kacamata penataran P4 dan mata pelajaran. Sedangkan di kalangan masyarakat kecil mengaitkan dengan tragedi G 30 S/PKI dengan segala harapannya pada Pancasila dan ketakutan akan 'cap' subversif. Apakah ini justru menjadi salah satu efek samping dari praksis pendidikan politik ideologis?

Upaya pemasyarakatan secara kuantitatif atau katakanlah secara superfisial sudah berhasil baik. Masyarakat nampak patuh dan mengerti dengan baik. Namun dari data di atas nampak bahwa golongan terakhir yang lebih banyak justru menyatakan sebaliknya. Mereka justru bersikap acuh tak acuh, bosan, apatis dan tidak mau tahu. Bagaimana mungkin nilai-nilai diinternalisasi dalam suasana keterpaksaan?

Penting adanya refleksi atas upaya yang telah kita tempuh selama ini. Ataukah memang pendapat masyarakat kecil dan mahasiswa seperti itu yang diharapkan. Bahwa nilai-nilai Pancasila yang fundamental sebagai dasar dan ideologi negara dipahami sebatas seputar penataran P4 dan peristiwa G 30 S/PKI cukup memprihatinkan. Padahal menurut pengamatan kami nampak jelas bahwa sebenarnya masyarakat kecil dan mahasiswa merasakan nilai luhur dan punya rasa memiliki terhadap Pancasila. Tetapi mengapa yang muncul kalau diharapkan pada pembicaraan sekitar Pancasila yang muncul adalah rasa takut, kaget, cemas dan juga bosan?

-ooOoo-

Daftar pustaka

1. Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*, Djakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh, 1968.
2. Sukarna, *Ideologi, suatu Studi Ilmu Politik*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
3. Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia,

